RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025 - 2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SARIFUDIN, SH

NIP. : 19670212 199312 1 001

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/138/KEP/22/2020 tanggal 31 Desember 2020. Bertugas untuk dan Atas Nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP Berkedudukan di Jalan Jl. Letnan Tukiyat No. 4a, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan program kerja berdasarkan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DLH

SARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199312 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.3.1 Maksud 4
1.3.2 Tujuan 4
1.2 4
1.3 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II 1
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1
2.1 Aspek Geografi 1
1.1 1
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 3
2.1.2 Geologi 4
2.1.3 Hidrologi 5
2.1.4 Penggunaan Lahan 6
2.2 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup 15
2.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 21
2.3.1 Analisa Jabatan Dinas Lingkungan Hidup 21
2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup 23
2.4 Evaluasi Kinerja Pelayanan 25
2.4.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 25
2.4.2 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup 44
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 44
2.5.1 Tantangan 44
2.5.2 Peluang 44
2.6 Analisa Gambaran Pelayanan. 44
BAB III 1
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 3
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 7
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi . 7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 13
3.5 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 24
3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis 25
BAB IV 1
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 1
4.1 Tujuan dan Sasaran 1

BAB V 1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1
5.1 Strategi 1
5.2 Kebijakan 2
BAB VI 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 1
6.1 Rencana Kinerja dan Pendanaan 1
6.2 Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan 11
6.2.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 11
6.2.2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 12
6.2.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 20
6.2.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 20
6.2.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 21
6.2.6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 23
6.2.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 27
6.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 28
6.2.9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 29
6.2.10 Program Pengelolaan Persampahan 31
6.3 Pengelolaan Resiko 33
BAB VII 1
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 1
BAB VIII 1
PENUTUP 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang 2
Gambar 2.2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Magelang 7
Gambar 2.3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 22
Gambar 2.4 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang..... 26
Gambar 2.5 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang..... 26
Gambar 4.1 Sasaran Rancangan Pembangunan 1
Gambar 5.1 Inovasi penguatan kearifan lokal peningkatan kapasitas Komunitas Jogo Tuk..... 2
Gambar 6.1 Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup 10
Gambar 6.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan 19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan 2
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Magelang.....3
Tabel 2.3 Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang 4
Tabel 2.4 Tipe Iklim di Kabupaten Magelang.....6
Tabel 2.5 Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018 7
Tabel 2.6 Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai.....10
Tabel 2.7 Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang 11
Tabel 2.8 Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi 14
Tabel 2.9 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin ...21
Tabel 2.10 Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 23
Tabel 2.11 Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2021. 24
Tabel 2.12 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja.. 27
Tabel 2.13 Pengukuran Kinerja Per Sasaran 28
Tabel 2.14 Tabel Perhitungan IKPS 2023 29
Tabel 2.15 Tabel Realisasi Neraca Pengelolaan Sampah 2023 31
Tabel 2.16 Data Capaian Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Mitigasi Perubahan Iklim 32
Tabel 2.17 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2023 34
Tabel 2.18 Daftar Sekolah Adiwiyata Sampai Tahun 2023 35
Tabel 2.19 Daftar Desa Proklim 2023 37
Tabel 2.20 Data Kegiatan/Usaha Diawasi Pencemarannya 39
Tabel 2.21 Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 45
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 4
Tabel 3.2 Telaahan Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025-2026 7
Tabel 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 13
Tabel 3.4 Gender Analysis Pathway Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 24
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 3
Tabel 5.1 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 2
Tabel 6.2 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Airnya.....13
Tabel 6.3 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Udaranya.....16
Tabel 6.4 Rencana akreditasi parameter UPTD Laboratorium Lingkungan DLH 19
Tabel 6.5 Identifikasi Risiko Operasional OPD 34
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 3
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 4
Tabel 7.3 Perkiraan kondisi yang digunakan dalam penentuan target kinerja Tahun 2025 - 2026 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan di Kabupaten Magelang, Urusan Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam rangka pengendalian pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan meminimalkan resiko negatif dampak pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengkaji tahap perencanaan, monitoring tahap pelaksanaan, dan pengawasan dampak lingkungan. dalam melaksanakan fungsinya, Dinas lingkungan hidup memiliki tujuan dan sasaran strategis lima tahunan yang dicantumkan pada rencana strategis OPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dimaksud dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Magelang terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Dokumen Rencana Strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup berfungsi juga sebagai panduan menyelaraskan program pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Republik Indonesia. Renstra ini diselaraskan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022. Penyelarasan dengan program dan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2029.

Berdasarkan pasal 7 sampai dengan 10 Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen Renstra didasarkan pada orientasi proses dan orientasi substansi. Orientasi proses yang dimaksud merupakan cara penyusunan dokumen menggunakan beberapa pendekatan yang berdasar pada:

- Politik, sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih;
- Teknokratik, sebagai hasil pemikiran perencana daerah dalam penjabaran pemenuhan agenda pembangunan di rencana pembangunan jangka panjang dan antisipasi pada perkembangan keadaan;
- Partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;

- *Top Down & Bottom Up* , dengan diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Yang dimaksud dengan orientasi substansi adalah isi dokumen sudah menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kajian lingkungan hidup strategis RPJMD, Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Saran dan rekomendasi dari Bappeda dan Litbangda, Standar Pelayanan Minimal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang - undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65).
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026 adalah untuk memberikan landasan operasional kebijakan taktis strategis lima tahunan urusan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2026 adalah :

a. Untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka RPJM Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJP Daerah.
b. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan) atau Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga perencanaan lebih terarah.
c. Memberikan arah, tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu dan efektif guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang.
d. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fungsi Renstra, Proses penyusunan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dengan Renstra Kabupaten/Kota lain dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas karakteristik wilayah pelayanan, apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi, misi Pemerintah Kabupaten Magelang terutama yang terkait dengan urusan lingkungan hidup. Misi terkait dijabarkan dalam tujuan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, dan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab ini juga menjelaskan cascading perumusan program dan kegiatan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya keadaan, mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bertugas melayani keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Pada prakteknya, pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan karakter wilayah yang sering disebut dengan ecoregion.

2.1 Aspek Geografi

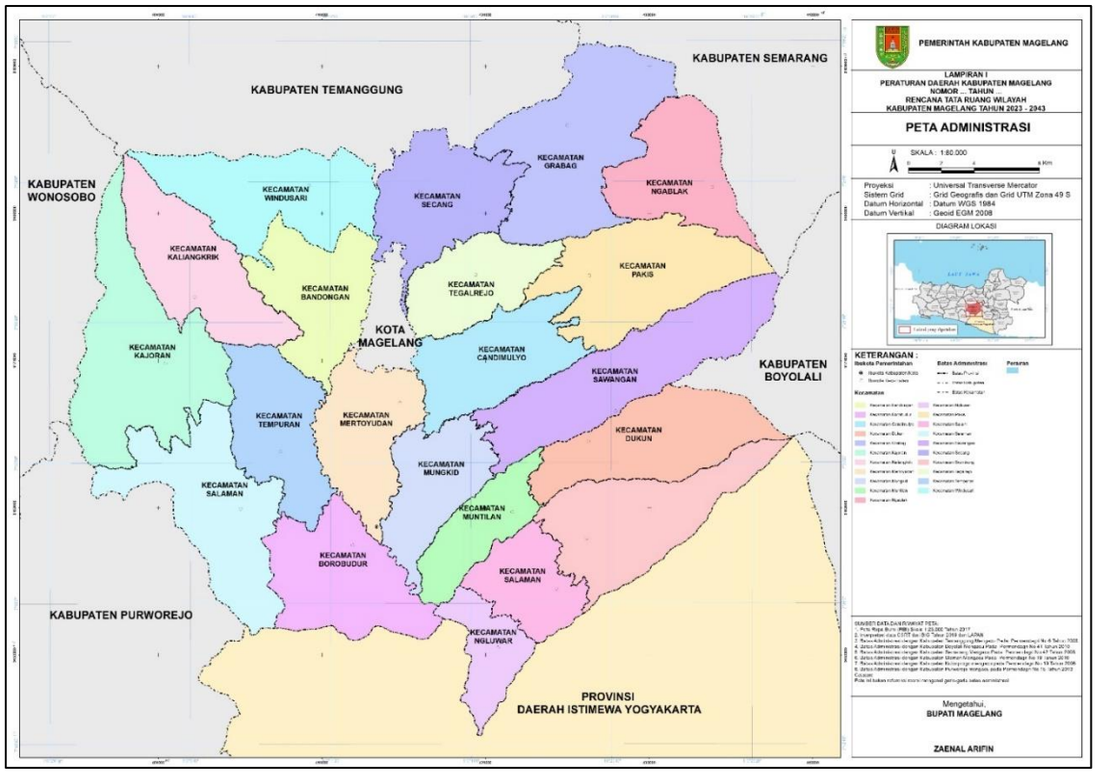
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 1.129,983 km^2. Luasan tersebut telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Luas wilayah tersebut merupakan luas wilayah definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG Nomor B-2.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tertanggal 3 Oktober 2022. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi antara $7^0$19’13” – $7^0$42’16” Lintang Selatan dan $110^0$01’51” – $110^0$26’58” Bujur Timur.

Kabupaten yang beribukota di Kota Mungkid ini, membawahi 21 kecamatan dan 367 desa dan 5 kelurahan. Mengutip pernyataan Badan Pusat Statistik dalam dokumen Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022, disebutkan bahwa 36,56 persen desa di kabupaten ini terletak di daerah lereng/puncak. Kecamatan Kajoran merupakan kecamatan terluas di kabupaten ini dengan luasan 83,41 km^2 atau sebesar 7,68 persen dari total luas seluruh wilayah kabupaten. Sementara itu Kecamatan Muntilan dan Ngluwar merupakan dua kecamatan terkecil dengan besaran kurang dari 30 km^2, tepatnya sebesar 28,61 km^2 (2,64 persen dari luas seluruh wilayah kabupaten) dan 22,44 km^2 (2,07 persen dari luas seluruh wilayah kabupaten).

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
- Sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.



Sumber: https://peta-hd.com/peta-kabupaten-magelang/

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang secara posisi merupakan wilayah strategis karena terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu Magelang merupakan penghubung anatar jalur pantura dengan jalur selatan-selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten Magelang
1.	Salaman	6.875	6,08
2.	Borobudur	5.759	5,10
3.	Ngluwar	2.396	2,12
4.	Salam	3.185	2,82
5.	Srumbung	6.185	5,47
6.	Dukun	5.760	5,10
7.	Muntilan	3.036	2,69
8.	Mungkid	4.023	3,56
9.	Sawangan	7.390	6,54
10.	Candimulyo	4.932	4,36
11.	Mertoyudan	4.628	4,10
12.	Tempuran	4.739	4,19
13.	Kajoran	8.678	7,68
14.	Kaliangkrik	5.632	4,98
15.	Bandongan	4.859	4,30
16.	Windusari	6.227	5,51
17.	Secang	5.143	4,55
18.	Tegalrejo	3.829	3,39
19.	Pakis	6.775	6,00
20.	Grabag	8.263	7,31
21.	Ngablak	4.686	4,15
Kabupaten Magelang		112.998	100,00

Sumber: Laporan Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2022-2042

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110^{0}01’51” dan 110^{0}26’58” Bujur Timur dan antara 7^{0}19’13” dan 7^{0}42’16” Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah Pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.

Berdasarkan Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa secara umum wilayah Kabupaten Magelang merupakan dataran tinggi yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Gunung Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta pegunungan Menoreh. Dua puluh satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang memiliki ketinggian wilayah yang beragam, yakni antara 153 hingga 3.065 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian rata-rata 360 mdpl. Sementara itu, berdasarkan publikasi BPS diketahui bahwa Kecamatan Ngablak merupakan wilayah dengan ketinggian wilayah tertinggi yakni berada di 1.378 mdpl. Sementara itu, Kecamatan Salaman menjadi kecamatan yang terletak pada ketinggian paling rendah, yaitu 208 mdpl.

Tabel 2.1.3 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
1.	Salaman	208
2.	Borobudur	235
3.	Ngluwar	202
4.	Salam	336
5.	Srumbung	501
6.	Dukun	578
7.	Muntilan	348
8.	Mungkid	320
9.	Sawangan	575
10.	Candimulyo	437
11.	Mertoyudan	347
12.	Tempuran	210
13.	Kajoran	578
14.	Kaliangkrik	823
15.	Bandongan	431
16.	Windusari	525
17.	Secang	470
18.	Tegalrejo	478
19.	Pakis	841
20.	Grabag	680
21.	Ngablak	1.378
Kabupaten Magelang		**360**

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk *basin* (cekungan) dengan dikelilingi lima gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta terdapat Pegunungan Menoreh di sisi selatan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga tanahnya subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Magelang mengalir satu sungai besar yaitu Sungai Progo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng-lereng gunung.

Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai topografi yang beragam. Luas daerah dengan topografi datar adalah 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153 - 3.065

meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Adapun Kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2 %	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2.	2 - 15 %	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3.	15 - 40 %	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4.	> 40 %	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

2.1.2 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan *alluvial* yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/*alluvial* yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.

2.1.3 Hidrologi

Kabupaten Magelang merupakan daerah resapan air yang sangat luas. Dataran rendah ditengah dikelilingi oleh dataran tinggi gunung dan pegunungan hingga mirip cawan air yang besar. Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Pemanfaatan sumber air permukaan yang sedang marak adalah untuk wisata air.

Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai besar yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai satu sungai besar dan 124 (seratus dua puluh empat) sungai kecil dengan jumlah debit maksimum 5.043,25 m^3/detik dan minimum 847,83 m^3/detik. Berdasarkan pendataan DLH tahun 2018 Kabupaten Magelang memiliki 219 (dua ratus sembilan belas) mata air dengan jumlah debit 12.252 liter/detik. Pada tri wulan I tahun 2019 telah terbentuk dua komunitas penyelamat mata air di Desa Ngargomulyo dan desa Wates Kecamatan Dukun. Gerakan Masyarakat Cinta Air Desa Ngargomulyo melakukan pendataan dan pembersihan mata air.

Wilayah Kabupaten Magelang sebagai daerah yang dikelilingi gunung-gunung merupakan daerah tangkapan air hujan. Dalam neraca air Tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m^3/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m^3/tahun.

Curah hujan potensial 4.067,14 juta m^3/tahun atau dengan intensitas 3.746 mm/tahun. Sedangkan air hujan tertampung 78,32 juta m^3/tahun.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Air Permukaan
  Air permukaan adalah air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:
- Air Tanah
  Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
  1) Mandala air tanah gunung api strato
     Air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing.
  2) Mandala air tanah antar pegunungan
     Air tanah jenis ini berada di antara Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas *aquifer* yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (kurang dari 10 meter), dengan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 219 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 yang merupakan bagian dari musim kemarau. Berdasarkan kajian tersebut dari 219 mata air, sebanyak 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan. Sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air. Pemanfaatan mata air untuk debit yang relatif kecil sebagian besar digunakan untuk pertanian. Sedangkan untuk debit diatas 50 l/ detik banyak digunakan untuk sumber air baku yang diolah menjadi air minum baik secara swadaya maupun PDAM, beberapa mata air juga dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air baku PDAM Kota Magelang. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62^0 C, dengan kelembaban udara 82 %. Sedangkan curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan 189 hari, dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi. Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

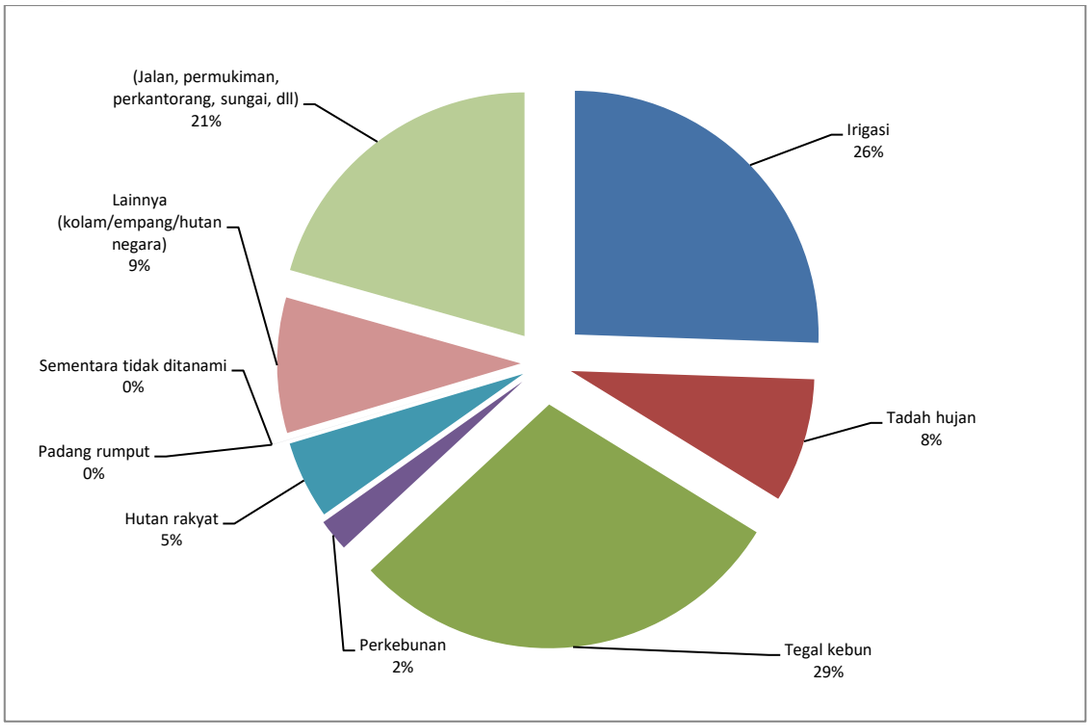
Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
Bandongan	431	B	I	C2
Borobudur	325	C	III	C3
Candimulyo	437	B	I	B2
Dukun	578	C	I	B3
Grabag	682	B	I	B2
Kajoran	578	B	I	B1
Kaliangkrik	823	B	I	B2
Mertoyudan	343	B	I	B2
Mungkid	325	B	II	C3
Muntilan	358	C	I	C3
Ngablak	1.362	C	I	C2
Ngluwar	202	-	-	-
Pakis	841	C	I	B3
Salam	336	B	I	B3
Salaman	208	B	I	B2
Sawangan	575	B	I	C3
Secang	407	B	II	C2
Srumbung	501	B	I	B1
Tegalrejo	478	B	I	B2
Tempuran	310	B	I	B2
Windusari	534	B	I	C2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

2.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018, rincian penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017 yaitu lahan pertanian menempati lahan seluas 86.175 hektar yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.681 ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 49.494 ha, selain itu ada lahan

bukan pertanian yang mencakup jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lainnya memiliki luasan sebesar 22.398 hektar. Adapun untuk lahan peruntukan sawah diantaranya sawah irigasi seluas 27.732 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8.949 ha. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2. 2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Magelang

Hutan merupakan salah satu penggunaan lahan dengan luasan cukup besar di Kabupaten Magelang. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, luas hutan lindung 1.474 Ha, hutan produksi tetap 1.765 Ha, hutan produksi terbatas 2.038 Ha, dan Taman Nasional 4.843 Ha.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2013-2017. Secara implisit, pertambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah. Luasan hutan rakyat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018

No	Tahun	Luas Hutan Rakyat (Ha)
1	2013	6.312
2	2014	6.562
3	2015	6.919
4	2016	5.611
5	2017	5.609
6	2018	NA

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019

2.1.4.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Magelang berdasarkan Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 masuk dalam sistem perwilayahan

Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, dan Secang.

Sistem Pusat Pelayanan juga ditegaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Sistem Pusat pelayanan atau sistem pusat kegiatan di Kabupaten Magelang meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Magelang meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan Mungkid, perkotaan Muntilan, perkotaan Mertoyudan, perkotaan Borobudur yang mengacu pada Kawasan Strategis nasional (KSN) Borobudur dan perkotaan Secang;
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi Kecamatan : Salaman, Grabag, Salam, Sawangan, Bandongan danTegalrejo; dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Kecamatan: Ngablak, Pakis, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Candimulyo, Dukun, Srumbung dan Ngluwar.
d. Sebagai Pusat Struktur ruang adalah Kota mungkid yang merupakan pusat ibukota Kabupaten dan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan

Sedangkan sistem perdesaaan di Kabupaten Magelang meliputi desa-desa pusat pertumbuhan dan desa pendukung (*hinterland*). Desa-desa pusat pertumbuhan yang dimaksud adalah desa-desa yang memiliki potensi atau keunggulan di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Desa-desa pertumbuhan meliputi:

a. Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan;
b. Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;
c. Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo;
d. Desa Sewukan, Kecamatan Dukun;
e. Desa Losari dan Cokro, Kecamatan Grabag ;
f. Desa Sambak, Kecamatan Kajoran;
g. Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik;
h. Desa Bondowoso dan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan;
i. Desa Paremono, Kecamatan Mungkid;
j. Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan;
k. Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak;
l. Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar;
m. Desa Kaponan, Kecamatan Pakis ;
n. Desa Gulon, Kecamatan Salam;
o. Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman;
p. Desa Ketep, Kecamatan Sawangan;
q. Desa Pucang, Kecamatan Secang;
r. Desa Kamongan, Kecamatan Srumbung;
s. Desa Banyuurip, Kecamatan tegalrejo;
t. Desa Bawang, Kecamatan Tempuran; dan
u. Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan, pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (main prime over) yaitu:

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya;
b. Kawasan Pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Minapolitan Ngrajek-Mungkid, Kawasan Minapolitan Menayu-Muntilan, dan Kawasan Minapolitan Mangunsari-Sawangan;
c. Kawasan Strategis Pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya; dan
d. Kawasan Peruntukan Industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, Struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

a. Pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
b. Pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak
c. Pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan
d. Pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

2.1.4.2 Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung terdapat pada sebagian Kecamatan: Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 1.474,70 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air, berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung.
3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
   Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 219 mata air yang perlu dilindungi.
   Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan di sekitar sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi, kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai

No	Nama Sungai	Keterangan
1	Sempadan sungai besar: Sungai Progo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
2	Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sunga Blongkeng e. Sungai Pabelan f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban h. Sungai Elo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
3	Sempadan sungai di kawasan perkotaan	Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

4. Kawasan pelestarian alam berupa Kawasan Taman Nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). Sedangkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa

Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). Pengaturan pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi.

5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan), Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar), dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.5. berikut:

Tabel 2. 5 Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah tinggi	Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara.
Rawan gerakan tanah menengah	Kecamatan Borobudur dengan kemiringan $\geq 10^0 - 20^0$, Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo.
Rawan gerakan tanah rendah	Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur.
Rawan gerakan tanah sangat rendah	Kecamatan Mertoyudan
Sangat rendah	Kecamatan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi: Lereng Gunung Merbabu, Lereng Gunung Merapi, dan Kecamatan Borobudur.

2.1.4.3 Kawasan Budidaya

1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
   a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.
   b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.
2) Kawasan hutan rakyat mencapai luas ± 6.562 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak.

3) Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (36.882 ha) dan Kawasan pertanian lahan kering (49.523 ha) yang lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 42.070 ha yang terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.
4) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.437 ha.
5) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang direncanakan seluas ± 10.016 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran.
6) Kawasan peruntukan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijauan makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan.
7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid.
8) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.
9) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang yang merupakan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang ditetapkan di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha.
10) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.
11) Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
    a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro.
    b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.

2.1.4.4 Kawasan Strategis

Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten

Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya.

Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut.

Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau *road map* dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2.1.4.5 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang antara lain:

a) Tanah longsor di 21 kecamatan;
b) Banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
c) Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;

d) Kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah) dan Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno).

e) Kebakaran hutan;

f) Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih dalam kondisi aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Yang dimaksud dengan Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Wilayah yang digolongkan wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, di lingkup Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
1	KRB III		
	a. Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan (letaknya paling dekat dengan sumber bahaya) dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran batu/lontaran material pijar), gas beracun, serta hujan abu lebat, meliputi 3 wilayah kecamatan dan 16 desa	Srumbung	1. Kaliurang 2. Kemiren 3. Ngablak 4. Nglumut 5. Tegalrandu 6. Mranggen 7. Ngargosoko 8. Srumbung
		Dukun	1. Sengi 2. Sewukan 3. Paten 4. Krinjing 5. Kalibening 6. Sumber 7. Ngargomulyo 8. Keningar
	b. Jarak dari puncak Merapi 0-10 km	Sawangan	1. Wonolelo 2. Kapuhan 3. Ketep
2	KRB II		
	a. Kawasan rawan bencana II, juga berpotensi terlanda aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan	Srumbung	1. Kamongan 2. Jerukagung 3. Sudimoro 4. Pandanretno 5. Polengan 6. Bringin 7. Pucanganom
	b. Jarak dari puncak Merapi 10-15 km	Dukun	1. Mangunsoko 2. Dukun 3. Banyudono 4. Banyubiru 5. Ngadipuro
		Sawangan	1. Krogowanan 2. Sawangan 3. Gondowangi 4. Mangunsari
3	KRB I		
	a. Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang rawan	Srumbung Dukun	1. Bringin 1. Ngadipuro

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
	terhadap lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava, meliputi : Sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu b. Jarak dari puncak Merapi 15-20 km	 Salam Muntilan Mungkid Ngluwar 	2. Ketunggeng 1. Salam 2. Jumoyo 3. Gulon 4. Seloboro 5. Sirahan 1. Gondosuli 2. Tamanagung 3. Keji 4. Menayu 5. Adikarto 6. Sokorini 7. Muntilan 8. Pucungrejo 9. Gunungpring 10. Ngawen 11. Sriwedari 1. Bojong 2. Pabelan 3. Ngrajek 4. Progowati 1. Blongkeng 2. Plosogede 3. Somokaton 4. Pakunden 5. Bligo

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2018 (RPJMD 2025-2026)

Wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang memiliki kedalaman tanah >60 cm. Tanah yang cukup tebal dan kelerengan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

2.2 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2021, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

1) menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;

2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4) menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
5) menyelenggarakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6) menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7) menyelenggarakan kegiatan Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
8) menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
9) menyelenggarakan pembinaan di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
10) menyelenggarakan fasilitasi di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
11) menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
12) menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
13) membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan UPT Dinas Lingkungan Hidup;
14) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
15) menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
16) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
17) menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Lingkungan Hidup; dan
18) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH).

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media air, udara dan tanah, pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gas rumah kaca dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;

3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
4) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan/penyuluhan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6) mengarahkan pelaksanaan pencegahan dan pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
7) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, penanganan dan pembinaan program strategis lingkungan hidup seperti: Program Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), Pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO), dan Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi GRK);
8) mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan rekomendasi teknis/persetujuan teknis/rincian teknis pada pengelolaan air limbah, udara, tanah dan limbah B3;
9) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
10) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan data pencemaran dan kerusakan lingkungan;
11) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
12) memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
13) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
14) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
15) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
16) mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PSPKLH)

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4) mengoordinasi dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
5) mengoordinasi pelaksanaan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman teknis dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan urusan lingkungan hidup lainnya;
6) mengoordinasikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base pengelolaan persampahan;
7) mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian program strategis lingkungan hidup seperti: Program bank sampah, Program TPS 3R, Program Kampung Iklim, Program Sekolah Adiwiyata, dan Program Adipura;
8) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
9) memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
10) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
11) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
12) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
13) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup (PDPL).

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
4) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
5) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan pemetaan usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu persetujuan lingkungan;
6) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen persetujuan lingkungan;
7) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang persetujuan lingkungan dan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
8) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), konsep kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
10) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan, seperti: imbal jasa lingkungan sesuai pedoman teknis yang ditentukan agar terwujud peran serta masyarakat dan dunia usaha;
11) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
12) merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
13) memfasilitasi pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengawasan oleh pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
14) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program strategis lingkungan hidup seperti: Nirwasita tantra *(green leadership)*;
16) membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
17) memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
18) memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
19) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;

20) mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
21) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
22) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup (PKKLH).

Memimpin pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
4) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Konservasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
5) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6) mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
7) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program strategis lingkungan hidup, seperti: Program Kalpataru, Pembangunan dan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman KEHATI), Taman Hutan Raya (TAHURA), Kebun Raya, Program Jogo Tuk, Program Merti Kali, dan Forum Gunung;
8) memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
9) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
10) mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;

11) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
12) mengarahkan dan mengendalikan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup; dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Analisa Jabatan Dinas Lingkungan Hidup

Kebutuhan pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 22. Formasi jabatan struktural yang terisi di Tahun 2021 sebanyak 19. Jabatan fungsional yang dibutuhkan sebanyak 14 Pegawai, namun pada Tahun 2021 baru terisi sebanyak 5 formasi. Secara keseluruhan kebutuhan PNS Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 152 pegawai namun sampai dengan Tahun 2021 baru terpenuhi 102 pegawai.

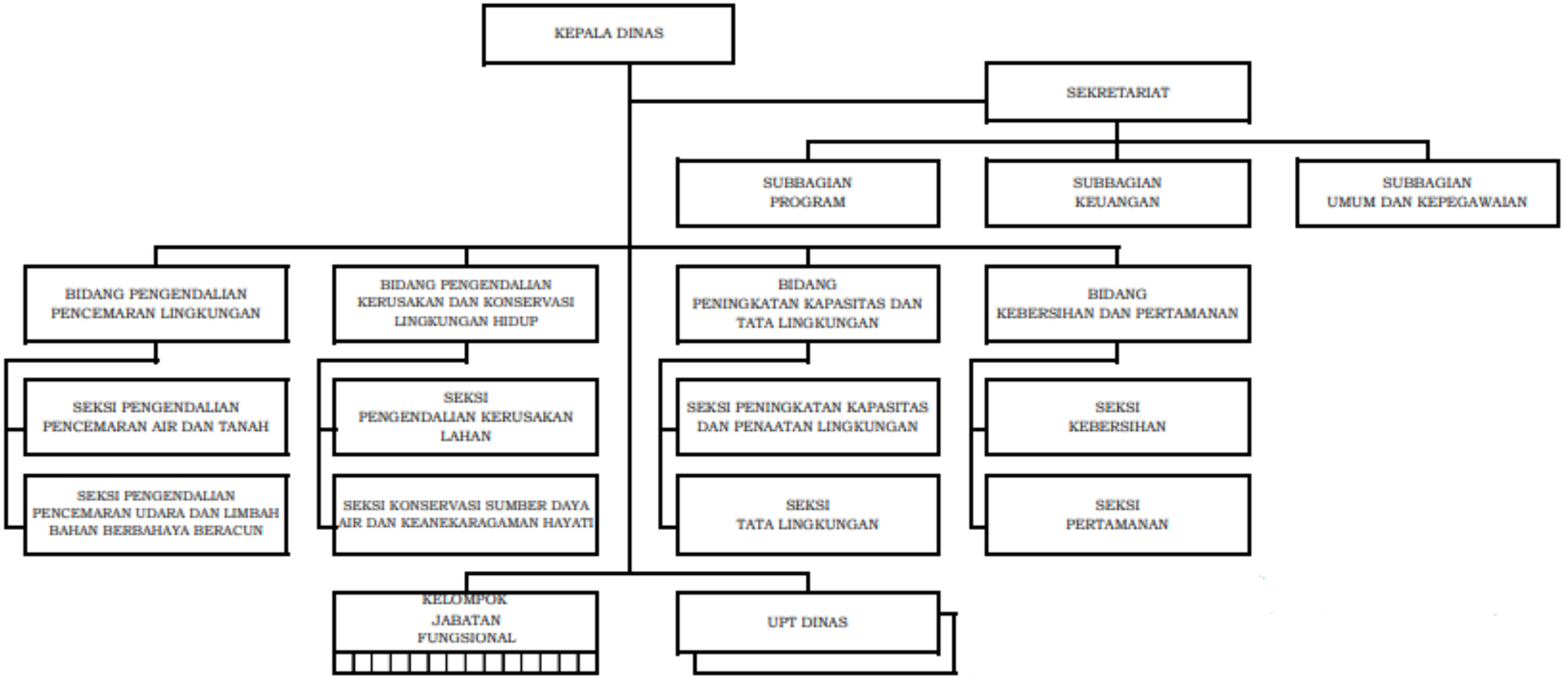
Untuk membantu pelayanan dan pelaksanaan tugas, DLH juga menggunakan jasa suporting staf dan tenaga harian lepas. Pada tahun 2021 jumlah suporting staf (SS) di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 12 pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 189 pegawai.

Tabel 2. 7 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Pegawai	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
PNS	S2	6	5
	S1	13	7
	D3	9	5
	D2	-	1
	SMA	27	1
	SMP	22	-
	SD	9	-

Berdasarkan data-data pegawai dan peta jabatan, dapat dilihat kelemahan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan tersebut antara lain:

- Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun;
- Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi.
- Masih banyak jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup belum terisi;
- Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian;
- Belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL Pertamanan dan Kebersihan masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sedangkan pegawai di UPTD Laboratorium Lingkungan berjenis kelamin perempuan.
- Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi;
- Masih banyak kebutuhan THL Kebersihan yang belum dipenuhi.



Gambar 2. 3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel 2.8. di bawah ini digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Rekapitulasi barang milik daerah sebagaimana tabel 2.7.

Tabel 2. 8 Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020

NO	OBJEK BARANG	SALDO AKHIR TAHUN 2023
1.3.1	**TANAH**	27.846.984.554,00
1.3.2	**PERALATAN DAN MESIN**	8.521.082.315,52
1.3.2.01	ALAT BESAR	1.516.979.587,13
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	2.684.458.804,26
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	636.486.300,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.942.420.462,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	22.097.500,00
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	8.173.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	511.494.162,21
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-
1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	104.476.000,00
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	82.396.500,00
1.3.2.18	RAMBU RAMBU	12.099.999,92
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-
1.3.3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	25.703.636.605,23
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	25.486.582.472,09
1.3.3.02	MONUMEN	-
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	217.054.133,14
1.3.4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	1.270.581.638,26
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	410.986.857,14
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	78.125.911,07
1.3.4.03	INSTALASI	732.404.089,25
1.3.4.04	JARINGAN	49.064.780,80
1.3.5	**ASET TETAP LAINNYA**	1.506.627.132,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	224.948.132,00
1.3.5.03	HEWAN	-
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
1.3.5.05	TANAMAN	1.281.679.000,00
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
1.3.6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	99.947.410,00
	TOTAL	64.948.859.655,01

Tabel 2. 9 Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2021

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	GEDUNG KANTOR	6			6
2	TPA	1		1	2
3	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
	RODA EMPAT	6			6
	RODA DUA	11			11
4	SARANA OPERASIONAL LABORATORIUM				
	KENDARAAN RODA EMPAT	1			1
	PERALATAN LABORATORIUM				
	- SPECTROFOTOMETER	2	1		3
	- OVEN	1			1
	- SHOWCASE	2			2
	- ANALYTICAL BALANCE	2			2
	- BOD INCUBATOR	1			1
	- THERMOREACTOR	1			1
	- HOTPLATE		1		1
	- WATERBATH		1		1
	- ALAT GELAS DAN PENDUKUNG LAINNYA	151			151
5	SARANA OPERASIONAL PENGURANGAN SAMPAH				
	KENDARAAN RODA EMPAT	1			1
	KENDARAAN RODA TIGA	3			3
6	SARANA OPERASIONAL PENANGANAN SAMPAH				
	KONTENER	25		4	29
	GEROBAK	42	20	8	70
	KENDARAAN				
	- TRUCK ARMROLL	9			0
	- TRUCK DUMP	6	1	1	8
	- PICK UP	11			9
	- RODA TIGA	3	1	4	8
7	SARANA PENDUKUNG TPA				
	JEMBATAN TIMBANG	1			1
	CCTV	1			1
	KOMPRESOR MINI	1			1
	MESIN PEMILAH	1			1
	CONVEYOR	1			1
	BLOWER	1			1
	MESIN POMPA AIR LINDI	1			1
	EXCAVATOR KOMATSU	3			3
	BULLDOZER KOMATSU	1			1
	RODA TIGA VIAR	1			1
	PENCACAH KECIL	3			3
	PENCACAH BESAR	4			4
	PENGAYAK SAMPAH	1			1

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
8	SARANA PENDUKUNG PERTAMANAN				
	KENDARAAN				
	- DUMP TRUCK	1			1
	- RANGER	1			1
	- PENYIRAMAN	3	1		4
	- PENYEDOT TINJA	1			1
	- MOBIL TOILET	1			1
	- MOBIL PICK UP	2			1
	MESIN POTONG RUMPUT GENDONG	29			29
	MESIN POTONG RUMPUT DORONG	4	2		6
	POMPA PENYIRAMAN	10			10
	MESIN PENCACAH SAMPAH	1			1
	CCTV	1			1
	MESIN LAS	2			2
	GENERATOR SET	1			1
	COMPRESSOR	1			1
	GERGAJI MESIN	4			4
9	SARANA PENDUKUNG PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN				
	DRONE	1			1
	LASER DISTANCE	1			1
	GPS	1			1
	PERAHU KARET	1			1

Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, banyak permasalahan sumber daya DLH. Permasalahan dimaksud antara lain:

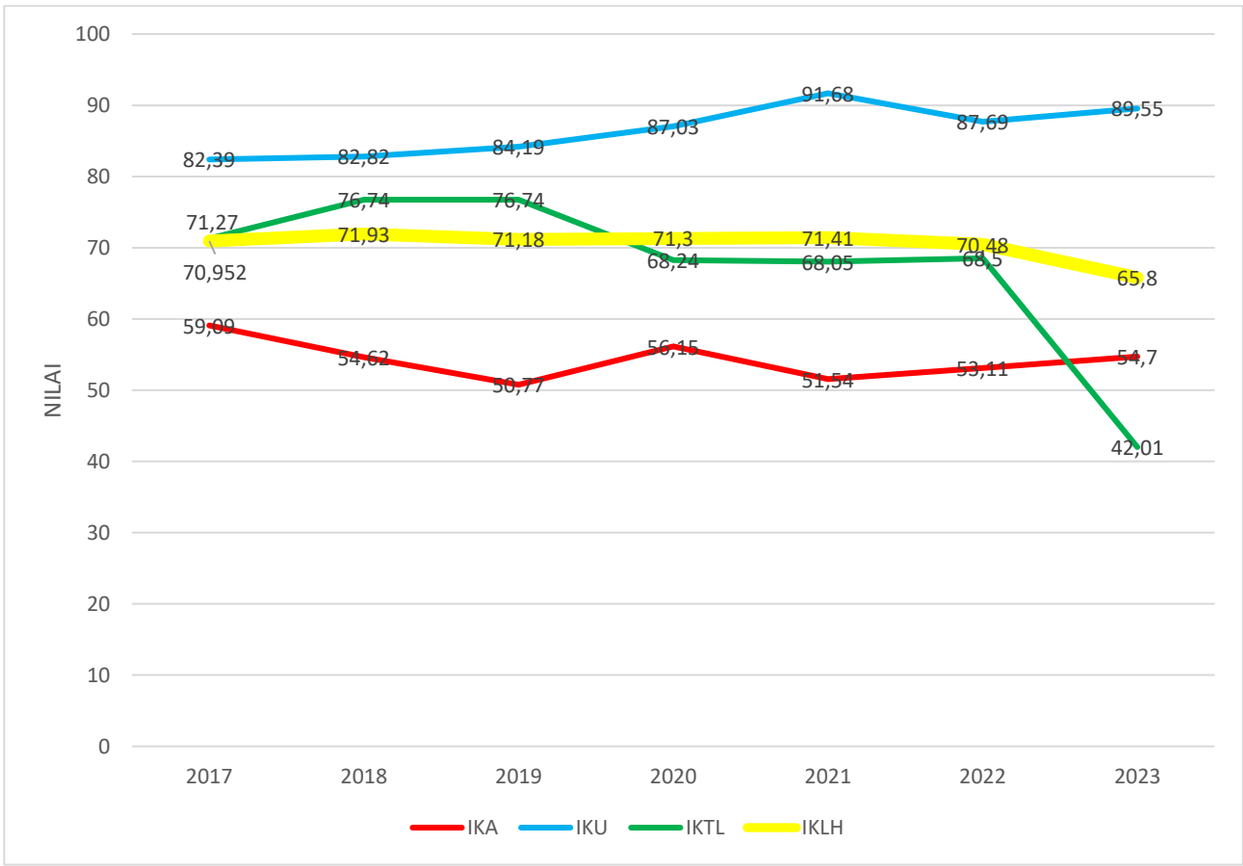
- Kondisi TPA saat ini sudah penuh;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan taman.

2.4 Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja fisik dan kinerja anggaran.

2.4.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, indikator program dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Capaian secara umum pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKLH berdasar Pembobobotan antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL). Secara umum, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk kategori sedang. Namun demikian, perlu tetap waspada dan berusaha terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena efek negatif aktifitas perusakan dan pencemaran lingkungan hidup berlangsung dalam waktu yang lama.



Gambar 2. 4 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang.

Penghitungan nilai IKLH sebelum Tahun 2020 dan nilai IKLH Tahun 2020 berubah, perubahan penghitungan nilai IKLH ini didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Sebelum Tahun 2020, IKLH dihitung dengan komposisi (0,3xIKA)+(0,3xIKU)+(0,4xIKTL); sedangkan sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL /SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Hal : Metode Perhitungan IKLH adalah = (0,376xIKA)+ (0,405xIKU)+(0,219xIKTL). Metode perhitungan tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021. Nilai IKLH tahun 2023 turun dari tahun 2022 dari semula 70,48 menjadi 65,80. Penurunan terjadi akibat penurunan indeks kualitas tutupan lahan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 2.10.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif.** Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas lngkungan Hidup adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Indikator Positif *apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\textit{Persentase Capaian Kinerja (}\textbf{\textit{Indikator Positif}}\textit{)} = \frac{\textit{Realisisasi}}{\textit{Rencana}} \; \textit{X 100 \%}$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 10 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

B. Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Secara umum capaian target kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup cukup baik. Terjadi peningkatan yang pesat pada Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah cenderung stagnan. Hal tersebut karena saat ini Kabupaten Magelang dala tahap menunggu kesiapan pembangunan TPST Pasuruhan dan regional di Bandongan.

Tabel 2. 11 Pengukuran Kinerja Per Sasaran.

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Capaian Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	*Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim*	*(Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi jogo tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup)/3*	*39,35%*	*39,81%*	*45,77%*	*60,25%*
2	*Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*	*Sesuai perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.*	*41,47 angka 1-100*	*NA angka 1-100*	*42,43 angka 1-100*	*41,64 angka 1-100*
3	*Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah*	*(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%*	*na %*	*4,65%*	*6,98%*	*33,33%*

3.2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Target 2023 : 50 angka (0-100)

Capaian 2023 : 41,64 angka (0-100)

a. Penyebab kegagalan: Cakupan penanganan sampah masih terbatas, belum menyeluruh ke semua desa dan kelurahan.
b. Alternatif solusi: Perlu segera dibuat peraturan bupati tentang pengurangan dan penanganan sampah termasuk pemanfaatan dana desa untuk memperbanyak dan mengoptimalkan TPS3R.
c. Capaian pengurangan sampah sebesar 25,13% dan capaian penanganan sampah sebesar 22,62%. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang per Semester I Tahun 2022 adalah sejumlah 1.310.512 jiwa. Jumlah timbulan sampah harian Tahun 2022 adalah sebesar 667 Ton/Hari. Jumlah pengurangan pada tahun 2022 adalah sebesar 120,77 Ton/Hari atau 18,12%. Jumlah sampah yang tertangani sebesar 150,76 Ton/Hari atau 22,62%. Total pengelolaan sampah Tahun 2022 adalah sebesar 271,53 Ton/Hari atau 40,74%.

Tabel 3.5 Tabel Perhitungan IKPS 2023

Komponen	Parameter	Indikator	Sub-indikator	Nilai Aktual	Keterangan		Nilai IKPS
Jumlah Penduduk (orang)				1.324.756			
Timbulan Sampah (Ton/hari)				662,4			
Jenis TPA				LANDFILL			
Total APBD (Rp)				2.721.238.944.250			
Indeks Pengelolaan (Governance)	**Input**	**Kebijakan**	Perda RPJMD terdapat visi & misi pengelolaan sampah	Ada	Indikator Sasaran Daerah		3,5
			Perda Pengelolaan sampah	Ada	No.7 Tahun 2017		3,5
			Perbup/Perwali Jakstrada	Ada	Perbup No.39 Tahun 2018		2
			Perbup/Perwali Pembatasan sampah	tidak ada			0
			Perbup/Perwali Pengurangan sampah	tidak ada			0
			Perbup/Perwali Penanganan sampah	tidak ada			0
			Surat Edaran Bupati/Walikota	Ada	Inbup Bank Sampah		1
			Total Nilai				**10**
		Sumberdaya Manusia	Jumlah Pejabat Struktural	3	orang		
			Jumlah Staf	6	orang		
			Jumlah Petugas Lapangan	242	orang		
			Total Nilai	**2,64**			**3**
		Sarana prasarana pengangkutan (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	**Keterangan Pengangkutan Sampah**	**Jumlah**	**Kapasitas (ton)**	**Trip per hari**	
			Truk sampah besar				
			Truk sampah sedang				
			Truk sampah kecil				
			Truk kontainer	40	3	3	

			Truk amroll besar				
			Truk amroll sedang	10	6	3	
			Truk amroll kecil				
			Dump truck besar				
			Dump truck sedang	8	7	2	
			Dump truck kecil				
			Mobil Pick-up	12	3	3	
			Gerobak sampah				
			Lainnya 1 Roda Tiga	6	1	4	
			Lainnya 2				
			Lainnya 3				
			Keterangan Pengolahan Sampah	**Jumlah**	**Kapasitas (ton)**		
			Pusat Daur Ulang	1	10		
			TPS3R	46	5		
			Biodigester				
			TPST	2	75		
			RDF				
			Lainnya 1				
			Lainnya 2	1	5		
			Lainnya 3				
			Total Nilai	**7,85**			**5**
		Anggaran	Total anggaran pengelolaan sampah	12.137.394.000			
			Total Nilai	**0,00446**			**1**
		Total Input					**19**
	Proses	**Sosialisasi & pemahaman**	Kampanye fisik	Ada	Lomba dan sosialisasi Bank Sampah		2
			Kampanye media konvensional	Ada	Jamus radio RSPD		1
			Kampanye media online	Ada	World clean up day		1
			Kampanye media sosial	Ada	World clean up day		1
			Total Nilai				**5**
		Acceptability & implementasi	Jumlah bank sampah aktif	372			
			Jumlah TPS3R aktif	46			
			Jumlah desa / kelurahan	372			
			Total Nilai	**1,12**			**5**
		Total Proses					**10**
	Total indeks pengelolaan						**29**
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	**Output**	**Rasio capaian**	Capaian pengurangan sampah tahun ini	24,15	%		
			Capaian penanganan sampah tahun ini	27,06	%		
			Jakstrada pengurangan sampah tahun ini	27	%		
			Jakstrada penanganan sampah tahun ini	72	%		
			Total Nilai	**23,86**			**4,77**
		Efisiensi Anggaran	Capaian pengurangan sampah tahun sebelumnya	11,25	%		
			Capaian penanganan sampah tahun sebelumnya	16,29	%		
			Jakstrada pengurangan sampah tahun sebelumnya	26	%		
			Jakstrada penanganan sampah tahun sebelumnya	73	%		
			Total Nilai	**11,84**			**2,37**

		Total Output					**7,14**
	Outcome	Kota Bersih	Penghargaan Adipura				
			Nilai Adipura				
		Total Outcome					**0,00**
	Dampak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKA	55			
		Total Dampak		**55,00**			**5,50**
	Total Indeks Efektivitas dan Efisiensi						**12,64**
Total IKPS							**41,64**

Tabel 3.6 Tabel Realisasi Neraca Pengelolaan Sampah 2023

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	241,767.97
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	58,382.29
	Persentase pengurangan sampah	24,15
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	30,304.14
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	25,68
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	28,052.47
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	65,411.72
	Persentase penanganan sampah	27,06
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	21,611.72
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	13,581.72
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	8,030.00
g	Pemrosesan akhir	43,800.00
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	43,800.00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	123,794.01
	Persentase sampah terkelola	51.20
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	117,973.96
	Persentase sampah tidak terkelola	48.80

3.2.2. Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Mitigasi Perubahan Iklim

Target 2023 : 40,70 %

Capaian 2023 : 60,22 %

a. Penyebab kegagalan: Tidak terdapat Hambatan dalam mencapai target 2023.
b. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air. Sudah dilaksanakan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan sekolah adiwiyata, serta makin populernya program kampung iklim.
c. Alternatif solusi: Perlu pendataan ulang dan berkoordinasi dengan DPUPR, BPS, dan Provinsi Jawa tengah mengenai Data Ruang Terbuka Hijau Publik, dan sinkronisasi data RTH pada penetapan RTRW baru.
d. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Tabel 3.7 Data Capaian Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Mitigasi Perubahan Iklim

No	Indikator	Formula	Satuan	Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	(1+2+3+4)/4	%	39,35	39,81	45,77	60,22%
1	Cakupan konservasi jogo tuk	Persentase Mata Air yang dikonservasi + Persentase Daerah resapan air yang dikonservasi)/2		9,35%	10,40%	11,53%	12,85%
1.a	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	(Luas kawasan resapan air yang dikonservasi/ Luas kawasan resapan air) x 100%	%	2,56%	2,86%	3,05%	3,28%
	Luas kawasan resapan air yang dikonservasi		Ha	437,89	487,89	520	560
	Luas kawasan resapan air		Ha	17075,67	17075,7	17075,67	17075,7
1.b	Persentase mata air dikonservasi	(Jumlah mata air yang dikonservasi/ Jumlah target mata air yang dikonservasi) x 100%		16%	18%	20%	22,42%
	Jumlah mata air yang dikonservasi		Ha	36	40	44	50
	Jumlah target mata air yang dikonservasi		Ha	223	223	223	223

No	Indikator	Formula	Satuan	Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023
2	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	(Persentase sekolah adiwiyata + Persentase kampung proklim)/2	%	22,37%	23,12%	25,78%	28,02%
2.a	Persentase sekolah Adiwiyata	(Jumlah sekolah Adiwiyata/ Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata) x 100%	%	39,09%	39,26%	38,13%	34,80%
	Jumlah sekolah Adiwiyata		sekolah	43	53	61	71
	Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata		sekolah	110	135	160	204
2.b	Persentase Desa Proklim	(Jumlah Desa melaksanakan ProKlim/ Jumlah Desa dan Kelurahan) x 100%	%	5,65%	6,99%	13,98%	21,23%
	Jumlah Desa melaksanakan ProKlim		Desa/ Kelurahan	21	36	52	79
	Jumlah Desa dan Kelurahan		Desa/ Kelurahan	372	372	372	372
3	Persentase RTH Publik yang terkelola	(Luas RTH Publik dikelola/Luas RTH Publik) x 100%	%	25,69%	25,70%	100%	100%
4	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		%	100%	100%	100%	100%

Persentase RTH Publik yang terkelola 25,80%, Cakupan konservasi jogo tuk 14,49%, Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup 43,80 %, Total Terdapat 50 Mata air yang di konservasi sampai dengan 2023 dari 223 Mata Air target terdaftar pada renstra 2025-2026. Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup mengandalkan Bank pohon untuk konservasi daerah resapan air. Tanaman pada Bank Pohon berasal dari sumbangan ASN yang naik pangkat, jabatan, gaji, pension maupun perjalanan dinas luar daerah. Terdapat juga CSR dari swasta dan akademisi. Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelatihan pada komunitas jogo tuk untuk membuat bibit berkualitas dan bernilai ekonomi.

Ruang Terbuka Hijau Publik pada Tahun 2022 sudah tidak mendasarkan lagi pada pendataan Tahun 2018. Data Ruang terbuka Hijau Publik masih menunggu penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Tabel 3.8 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2023

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
1	Bandungrejo,ngablak	10	250	Rowo peti, rowo kembang, rowo puluhan, sowo, kali soko
2	Krinjing,Kajoran	1.148	28.700	Sibotor, krinjijng, si podang, kali wetan, sidali, sigethuk, kali njoho
3	BKAD (BADAN KERJASAMA ANTARDESA)	200	5.000	
4	KKN UGM Ds.Giritengah	20	500	Bonggol, kali oho, Cangkring
5	BANYUROTO	100	2.500	Butak, centong, gondang, kringin, garon
6	KKN UGM KEBONSARI	20	500	Kali gede, kali tengah, kali sinan
7	Tampir wetan	1.000	25.000	Sekeduk, cangkring, sebendo, blondo
8	Disdukcapil	30	750	sekunir
9	MIN2	75	1.875	
10	SMP2 PAKIS	17	425	pandan
11	Kodim	20	500	
12	Bandungrejo	4	100	Doplang derpoasan
13	MIN 3	60	1.500	
14	KKN UIN SLTG	35	875	
15	SMA1 MTL	35	875	
16	SMA PL	21	525	
17	PWI Kab MGL	35	875	
18	KKN UNNES	100	2.500	
19	Pirikan	155	3.875	kali gede, setono
20	Adikarto	38	950	sendang tirta sari
21	Bank Sampah Innova	26	650	
22	SMA Kokid	40	1.000	Legoh dangan, kali cunthel, kali kulon carikan, kali pandan, pace, balai kampung, nglegok, kreo, kuncen, kedok
23	SD BAWANG 1 PAKIS	20	500	kali lor, kali kulon
24	Perbanusa ngablak	80	2.000	Bawangan, Kedok, Ngrowo, Pusung, Prambanan, Curug, Lor desa, Kali wulu, kali punden, kali sadon
25	SMA Pangudi Luhur	100	2.500	
26	Hari Lingkungan Hidup	100	2.500	
27	PAUD Permata Hati	24	600	
28	Desa Prajenan	22	550	Kali bendo
30	DPMPTSP KAB.MGL	21	525	mbah murwah, mbah pono, mbah widul, belik malen, kali bulu, kali nangka, kali mbuhu, kali nangka, belik progo
31	UNNES	1.174	29.350	
32	KPS TULUS Desa Bondowoso	100	2.500	Kali pereng, winong, tengah, jagalan, kali serak
33	GIAT UNNES windusari	250	6.250	Siladu, segaron, sekemit, belik, setorong, tuk umbul, sejali, sekimpul, seteratai
34	KKN UII Dusun Sabranglor,Daleman,Pakis	500	12.500	bendo lor, bendo kidul
35	KPSM Tulus Bondowoso	100	2.500	Kali pereng, winong, tengah, jagalan, kali serak
36	Kebonlegi kaliangkrik	400	10.000	krincing
37	SMP1 Ngablak	104	2.600	Krangean, ringin, balong, gondang, tirto makmur, mbelik, ndaru, curi, sembung

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
38	KKN UNNES ngepanrejo bandongan	1.150	28.750	gatukan, kali pakel, kali cangkring, kali puring, johon, curuk, susangan
39	Blondo Carnival	50	1.250	mbelik
40	Banksampah sekargendis	11	275	
41	Polresta Kokid Magelang	500	12.500	ngentak
42	Polres Kota Magelang	200	5.000	
43	Pramuka Ktr Magelang	25	625	kolam
44	SMP 2 Mertoyudan	10	250	kali bendo, belik ngembel
45	SMP 2 Kaliangkrik	15	375	sirebut, damarjati, sigandul, wonocoyol,II,IV,IV,V, wonosari I,II
46	SDN 3 Mertoyudan	26	650	kali bendo, belik ngembel
47	Bank Sampah Darlingsih	222	5.550	
48	SDN Dlimas Tegal rejo	18	450	Wonosuko
49	Kecamatan Ngablak	20	500	Krangean
50	WCD (World Clean Day)	215	5.375	
51	BPN	120	3.000	kali bulu, kali nangka
52	Untid (Bidikmissi Ngepanrejo)	30	750	
53	Bank Sampah	10	250	
54	Paremono	10	250	combrang
55	Mbah Sadiman Wonogiri	60	1.500	
	Jumlah	8.876	221.900	

Tabel 3.9 Daftar Sekolah Adiwiyata Sampai Tahun 2023

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	PENGHARGAAN	TAHUN	KECAMATAN
1	60711270	MI Muhammadiyah Kaweron	SAK	2019	Muntilan
2	60711235	MIN 1 Magelang	SAK	2020	Mertoyudan
3	60711334	MIN 2 Magelang	SAK	2021	Secang
4	60711335	MIN 3 Magelang	SAK	2020	Secang
5	60711326	MIN 4 Magelang	SAK	2021	Salaman
6	60711297	MIN 6 Magelang	SAP	2022	Salam
7	60711390	MIN 7 Magelang	SAK	2020	Tempuran
8	20363681	MTs Muhammadiyah 1 Muntilan	SAK	2023	Muntilan
9	20307864	SD Muhammadiyah 1 Muntilan	SAK	2022	Muntilan
10	20307840	SD Muhammadiyah Tamanagung	SAK	2020	Muntilan
11	20307860	SD N Adikarto 1	SAK	2023	Muntilan
12	20307941	SD N Banyubiru 2	SAK	2023	Dukun
13	20307900	SD N Blondo	SAP	2022	Mungkid
14	20307766	SD N Borobudur 1	SAN	2022	Borobudur
15	20307759	SD N Borobudur 2	SAK	2023	Muntilan
16	20307831	SD N Girirejo 3	SAK	2020	Ngablak
17	20307793	SD N Grabag 1	SAP	2022	Grabag
18	20307806	SD N Gunungpring 1	SAK	2020	Muntilan
19	20307805	SD N Gunungpring 2	SAK	2020	Muntilan
20	20307804	SD N Gunungpring 3	SAK	2020	Muntilan

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	PENGHARGAAN	TAHUN	KECAMATAN
21	20307803	SD N Gunungpring 4	SAK	2020	Muntilan
22	20308087	SD N Jerukagung 1	SAK	2023	Srumbung
23	20308094	SD N Jumoyo 2	SAP	2018	Salam
24	20338280	SD N Kalijoso	SAK	2021	Secang
25	20308054	SD N Kalinegoro 3 Mertoyudam	SAK	2022	Mertoyudan
26	20308053	SD N Kalinegoro 5 Mertoyudan	SAK	2022	Mertoyudan
27	20308062	SD N Kalipucang	SAK	2019	Grabag
28	20308141	SD N Kebonrejo	SAK	2023	Salaman
29	20307993	SD N Madyocondro	SAP	2022	Secang
30	20307956	SD N Margoyoso	SAK	2023	Salaman
31	20307953	SD N Menayu 1	SAK	2020	Muntilan
32	20307964	SD N Muntilan	SAK	2020	Muntilan
33	20307963	SD N Muntilan 3	SAN	2019	Muntilan
34	20308033	SD N Ngadirejo	SAP	2023	Salaman
35	20308026	SD N Ngluwar 2 Ngluwar	SAK	2022	Ngluwar
36	20308004	SD N Pagersari	SAK	2023	Mungkid
37	20307430	SD N Progowati	SAN	2021	Mungkid
38	20307428	SD N Pucang Secang	SAK	2022	Secang
39	20307476	SD N Ringinanom 1	SAP	2018	Tempuran
40	20307507	SD N Salaman 1	SAK	2019	Salaman
41	20307506	SD N Salaman 2	SAP	2022	Salaman
42	20307478	SD N Sengi 2	SAK	2020	Dukun
43	20307495	SD N Sidomulyo	SAK	2022	Secang
44	20307494	SD N Sidomulyo 1	SAN	2018	Salaman
45	20307361	SD N Sikepan 1 Srumbung	SAK	2022	Srumbung
46	20307353	SD N Sokorini 1 Muntilan	SAK	2022	Muntilan
47	20307341	SD N Surodadi 1	SAK	2021	Candimulyo
48	20307407	SD N Tamanagung 4	SAN	2018	Muntilan
49	20307406	SD N Tampingan 1	SAK	2020	Tegalrejo
50	20307404	SD N Tampir Kulon 1	SAK	2021	Candimulyo
51	20307423	SD N Tanjung Muntilan	SAK	2022	Muntilan
52	20307414	SD N Tegalsari 2	SAK	2021	Candimulyo
53	20307377	SD N Tinjumoyo	SAK	2023	Windusari
54	20307388	SD N Tirto Grabag	SAK	2022	Grabag
55	20307655	SD N Windusari 2	SAN	2021	Windusari
56	20307861	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	SAP	2023	Muntilan
57	69900297	SDIT Alam Al-Hikmah Secang	SAN	2019	Secang
58	20307714	SMA N 1 Kota Mungkid	SAP	2022	Mertoyudan
59	20307644	SMA Van Lith Muntilan	SAK	2019	Muntilan
60	20307626	SMP N 1 Borobudur	SAN	2023	Borobudur
61	20307612	SMP N 1 Grabag	SAK	2023	Grabag

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	PENGHARGAAN	TAHUN	KECAMATAN
62	20307607	SMP N 1 Mungkid	SAP	2022	Mungkid
63	20307605	SMP N 1 Ngablak	SAP	2022	Ngablak
64	20307614	SMP N 1 Pakis	SAK	2020	Pakis
65	20307621	SMP N 1 Tegalrejo	SAK	2020	Tegalrejo
66	20307620	SMP N 1 Tempuran	SAN	2019	Tempuran
67	20307601	SMP N 2 Kajoran	SAK	2023	Kajoran
68	20307587	SMP N 2 Mertoyudan	SAN	2017	Mertoyudan
69	20307583	SMP N 2 Pakis	SAK	2020	Pakis
70	20307579	SMP N 2 Secang	SAK	2022	Secang
71	20337902	SMP Terpadu Ma'arif Gunungpring Muntilan	SAP	2020	Muntilan

Tabel 3.10 Daftar Desa Proklim 2023

No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan			
			Pratama	Madya	Utama	Lestari
1	Ngrancah	Grabag			v	
2	Ngargomulyo	Dukun			v	
3	Dusun Madukoro II Desa Madukoro	Kajoran			v	
4	Desa Karangrejo	Borobudur			v	
5	Desa Sambak	Kajoran				v
6	Desa Tamanagung	Muntilan			v	
7	Desa Wonogiri	Kajoran			v	
8	Desa Banyuroto	Sawangan				v
9	Desa Banyubiru	Dukun			v	
10	Kelurahan Muntilan	Muntilan			v	
11	Desa Jumoyo	Salam			v	
12	Desa Candirejo	Borobudur			v	
13	Polbangtan Yoma Tegalrejo	Tegalrejo			v	
14	Dusun Taruman Desa Umbulsari	Windusar			v	
15	Desa Kebonrejo	Candimulyo			v	
16	Desa Blondo	Mungkid		v		
17	Dusun Kersan Desa Jerukagung	Srumbung		v		
18	Desa Ngargoretno	Salaman			v	
19	Desa Margoyoso	Salaman				v
20	Desa Paten	Srumbung			v	
21	Desa Tirto	Grabag			v	
22	Dusun Ngapon Desa Ketangi	Kaliangkrik		v		
23	Desa Krincing	Secang		v		
24	Desa Sawangan	Sawangan			v	
25	Desa Krinjing	Kajoran		v		
26	Desa Krumpakan	Kajoran		v		
27	Desa Pandansari	Kajoran		v		
28	Desa Pucungroto	Kajoran		v		
29	Desa Bambusari	Kajoran		v		
30	Desa Mangunrejo	Kajoran		v		
31	Desa Sutopati	Kajoran		v		
32	Desa Pandanretno	Kajoran		v		
33	Desa Sukomulyo	Kajoran		v		

No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan			
			Pratama	Madya	Utama	Lestari
34	Desa Sidorejo	Kajoran		v		
35	Desa Gandusari	Bandongan		v		
36	Desa Majaksingi	Borobudur		v		
37	Desa Ketep	Sawangan			v	
38	Desa Butuh	Sawangan			v	
39	Desa Mangunsari	Sawangan			v	
40	Desa Ketundan	Pakis		v		
41	Desa Gondowangi	Sawangan		v		
42	Desa Soronalan	Sawangan		v		
43	Desa Wulunggunung	Sawangan		v		
44	Desa Pogalan	Pakis		v		
45	Desa Krogowanan	Sawangan		v		
46	Dusun Kopen Desa Podosoko	Sawangan		v		
47	Desa Wonolelo	Sawangan		v		
48	Desa Tirtosari	Sawangan		v		
49	Desa Gantang	Sawangan		v		
50	Desa Kapuhan	Sawangan		v		
51	Dusun Genteran Desa Jati	Sawangan		v		
52	Desa Pagersari	Mungkid			v	
53	Desa Sidosari	Salaman			v	
54	Desa Krasak	Salaman			v	
55	Desa Sriwedari	Salaman			v	
56	Desa Kalirejo	Salaman			v	
57	Desa Sidomulyo	Salaman			v	
58	Desa Kalisalak	Salaman			v	
59	Desa Kebonrejo	Salaman			v	
60	Desa Ngampeldento	Salaman			v	
61	Desa Kaliabu	Salaman		v		
62	Desa Sawangargo	Salaman		v		
63	Desa Wuwuharjo	Kajoran			v	
64	Desa Banjaragung	Kajoran			v	
65	Desa Bangsri	Kajoran			v	
66	Desa Sidowangi	Kajoran			v	
67	Desa Madugondo	Kajoran		v		
68	Desa Sukomakmur	Kajoran		v		
69	Desa Kajoran	Kajoran		v		
70	Desa Bumiayu	Kajoran		v		
71	Desa Wadas	Kajoran		v		
72	Desa Lesanpuro	Kajoran		v		
73	Desa Ngargosari	Kajoran		v		
74	Desa Ngendrosari	Kajoran		v		
75	Desa Sukorejo	Kajoran		v		
76	Desa Banjaretno	Kajoran		v		
77	Desa Sangen	Kajoran		v		
78	Desa Kwaderan	Kajoran		v		
79	Desa Ngepanrejo	Bandongan	v			

3.2.3 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Target 2023 : 9,30 %

Capaian 2023 : 33,33 %

a. Hambatan dalam mencapai target 2023. Saat ini UPTD Laboratorium Lingkungan DLH tidak menerima pengajuan dari luar DLH karena dicabutnya peraturan daerah pengujian kualitas air dan udara yang menjadi dasar pungut retribusi pengujian kualitas lingkungan.
b. Alternatif solusi : Sedang diupayakan untuk memasukkan biaya retribusi pengujian kualitas lingkungan pada rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah berkoordinasi dengan Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI.

Dari 43 usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan pemunuhan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, baru ada 3 usaha yang dapat memenuhi ketaatan yaitu PT Papertech, CV Lembah Tidar dan PT Armada Karoseri. Dari 154 usaha yang wajib laporan pengelolaan lingkungannya baru terdapat 29 usaha/kegiatan yang mengirimkan laporan.

Tabel 3.11 Data Kegiatan/Usaha Diawasi Pencemarannya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
1	ARMADA TOWN SQUARE	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 1 Dsn. Saragan, Ds. Banyurejo, Mertoyudan, Kab. Mgl	Plaza dan Hotel	
2	BKIA AISYIYAH MUNGKID	Dsn. Citran, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan kesehatan	
3	CV. AGUS JATI	Dsn. Tanggulboyo, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelng	Industri Pengolahan Kayu	
4	CV. ANUGERAH	Jl. Raya Secang-Magelang Km 8 Kec. Secang, Kab. Mgl	Industri Karoseri	
5	CV. ARCON	Sidoagung, Tempuran, Magelang	Pembuatan Genteng Pres	
6	CV. BESTONE INDONESIA	Jl. M. Yusuf No 8, Pucungrejo Muntilan, Magelang	Kerajian Batu Alam	
7	CV. GUMUK WALIK MEDIKA	Jl. Rejosari No.1. Ds. Grabag Kec.Grabag Kab.Magelang	Klinik Pengobatan & Rumah Bersalin	
8	CV. JOYO BOYO PLASTIK	Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10, Dsn. Jambu, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pengolah Bijih Plastik	Taat
9	CV. KURNIA KULIT ABADI	Dsn. Kedon, Ds. Pasuruhan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Industri Penyamakan Kulit	Taat

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
10	CV. NEW SENTOSA	Jl. Kyai H. Sirat Km. 16, Dsn. Bangsren, Ds. Kricing, Kec. Secang, Kab. Magelang	Pembangunan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus	
11	CV. PANCA DAYA KARTIKA	Jl. Raya Grabag-Blender kwijilan Grabag Kec. Grabag Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu	
12	CV. SEMBODO JOYO	Dsn. Kenayan Ds. Ngabean Kec. Secang Kab. Magelang	Pembangunan Industri Pengolahan Kayu	
13	CV. SIDO DADI	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 22, Ds. Kaliabu, Kec. Salaman, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
14	CV. TRI SAKTI	Ds. Jogomulyo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Karoseri	
15	HOTEL CATUR PUTRA	Jl. Mayor Jend. Bambang Sugeng 308 Mertoyudan	Penginapan	Taat
16	HOTEL LOSARI COFFE PLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	Losari, Grabag, Magelang	Hotel	Taat
17	HOTEL SARASWATI BOROBUDUR	Jl.Balaputra Dewa 10 Ngaran lor, Borobdur, Magelang	Hotel	Taat
18	KAROSERI AVENA	Jl. Letnan Tukiyat Randugunting, Blondo, Mungkid, Magelang	Karoseri	
19	KLINIK YOGA DARMA	Jl. Pahlawan No. 26, Dsn. Prajenan, Ds. Mertoyudan, kab. Magelang	Klinik	
20	LABORATORIUM PRAMITA	Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan	Taat
21	NING TIDAR HOTEL	Ketanggan, Banjarnegoro, Mertoyudan	Hotel	
22	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Dsn. Tunjangan dan Dsn. Maitan, Ds. Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Jasa Pariwisata (Hotel Resort, Restaurant, Lounge dan SPA)	

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
23	PT. ALAM DAYA SAKTI	Dsn. Dukuhan, Ds. Bojong, Kec. Mungkid , Kab. Magelang	Indusri Pembuatan Pavling Blok Dan Batako	
24	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Dsn. Demesan, Ds. Girirejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pembangunan Pabrik Garment	
25	PT. ANUGERAH METALINDO GEMILANG	Dsn. Turus, Ds. Tumpurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pembangunan Usaha Kerajinan dari Logam	
26	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Tanggulrejo, Tempuran, Magelang	Industri Obat Tradisional sari Sehat	
27	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu	Taat
28	PT. CIOMAS ADI SATWA	Jl. KH. Maksum RT 02/RW 04 Dsn, Kiringan, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran	Pemotongan Hewan	
29	PT. DASAR KARYA UTAMA	Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10, Kel. Tempuran, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Payung dan pengolahan Kayu	
30	PT. DJOHAR	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 9,5, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil	
31	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH (AMANJIWO)	Ds. Majaksingi, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Hotel Amanjiwo	
32	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Ds.n. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
33	PT. KAYU LIMA UTAMA	Jl. Raya Magelang - Yogya km 7, Dsn. Randugunting, Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
34	PT. KRETYA ALAM INDUSTRI	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
35	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Jl. Pakelan-Bandongan, kedungingas, Bulurejo, kec. Mertoyudan	Industri Penyamaan Kulit	Taat
36	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7, Ds. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Industri Karoseri	Taat
37	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Jl. Munggur No.2, Dsn. Kalangan Wetan, Desa Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Keripik Singkong	Taat

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
38	PT. MITRA KAYU SEJATI	Jl. Purworejo, Telogosari, Margoyoso	Pengolahan kayu sengon	
39	PT. NASMOCO	Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km. 5, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pembangunan Bengkel dan Showroom Kendaraan Roda Empat	
40	PT. PALMAS PRIMA INDONESIA	Jl. Purworejo-Magelang KM.12 Dsn Tanggulrejo Tempuran	Industri Pembuatan Sabun	Taat
41	PT. PANDATEX	Jl. Magelang-Purworejo km. 10, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran	Industri Textil	Taat
42	PT. PAPERTECH INDONESIA	Jl. Anggrahan - Gatak No. 23 Ds. Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Kertas Karton	Taat
43	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Jl. Raya Magelang Jogja Km. 12 Dsn. Gadingan, Bojong, Mungkid	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg	Taat
44	PT. PODOREJO SUKSES	Dsn. Tempurejo Ds. Girirejo Kec. Tempuran Kab. Magelang	Pabrik Kopi Bubuk	Taat
45	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang	Industri Karoseri Agustus	
46	PT. RETOTA SAKTI	Jati Lor, Tonoboyo, Bandongan	Kerajinan tenun	Taat
47	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Dsn. Nuren, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang	Jasa Pelayanan Kesehatan	Taat
48	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Jl. Magelang Purworejo Km 11. Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang	Pengolahan Kayu Sengon	
49	PT. SIDOAGUNG FARM	Jl. Magelang Purworejo Sidoagung Tempuran, Kab. Magelang	Industry Makanan Ternak	
50	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Dsn. Kwangsan, Ds. Kedungsari, Kec. Bandongan, Kab. Magelang	Penjemuran sisik Ikan	
51	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 11, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
52	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT I	Jl Raya Magelang-Secang, Ds. Krincing, Kec Secang, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	Taat
53	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT II	Jl Raya Magelang-Secang, Dsn. Sempu, DS. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	Taat
54	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Jl.Raya Magelang-Purworejo Km.9, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
55	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Jambu,Tempurejo, Tempuran,Magelang	Perusahaan Tenun	Taat
56	RS. PADMA LALITA	Jl. Klangon Km 1 Muntilan	Rumah Sakit	Taat
57	RSU KAB. MAGELANG	Jl. Kartini No. 13 Kelurahan Muntilan	Pelayanana Kesehatan	Taat
58	RSU N-21 GEMILANG	Jl. Pondok Pabelan No. 5 Batikan, Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan	
59	RSUD Merah Putih	Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Magelang	Taat
60	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 24, Dsn. Kendal Growong, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang	Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat	
61	THE ORCHID GUEST HOUSE	Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, km. 2,1 Pasaranya,r Sumberrejo, Mertoyudan, Kab. Magelang	penginapan	
62	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA DAN MEKAR JAYA ABADI	Dsn. Batikan RT 02 RW 15, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
63	UD. SARI JAYA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10 Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pengolahan Gagang Cengkeh dan Kemenyan	
64	UNGGAS JAYA MITRA	Dsn. Turus, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran	Peternakan ayam	
65	CV. RAMIN MINERAL	Dsn. Panggaron Lor, Ds. Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang	Agrobisnis Peternakan Terpadu	
66	CV. SENGON PERKASA	Tlogosari, Margoyoso, Salaman	Perdagangan Barang Kayu Olahan (Laminating Board)	
67	KLINIK BEDAH RAWAT INAP MULYA HUSADA	Jl. Tentara pelajar No. 11 Dsn. Sidoarjo, Ds. Tamanagung, Muntilan	Pelayanan Kesehatan	
68	KLINIK RAWAT JALAN SAMADIYAH-USUP	Jl. Raya Magelang-Jogja Km. 13 RT 01 RW 016, Dsn. Batikan, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan	
69	UD. SEMBODO JOYO	Dsn. Kenayan, Ds. Ngabean, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Pupuk Organik	

2.4.2 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa prestasi urusan lingkungan hidup dapat diraih pada pelaksanaan Renstra 2019 – 2024. Prestasi tersebut baik tingkat provinsi maupun Nasional.

- ADIWIYATA NASIONAL
- PROKLIM LESTARI NASIONAL
- SERTIFIKAT AKREDITASI NASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN
- PENGHARGAAN PEMBINA PROKLIM KEPADA BUPATI MAGELANG
- TRIBUNNNEWS AWARD

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH.
2. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri.
4. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan
5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR);
6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.

2.6 Analisa Gambaran Pelayanan.

Dalam mempermudah melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Secara Utuh, dibuat analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pelayanan. Analisa dimaksud sebagaimana tercantum pada tabel 2.20.

Tabel 2. 12 Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kekuatan	Peluang
1. Sudah adanya perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, 2. Sudah adanya perda pengelolaan sampah 3. Sudah adanya perbup tentang Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 4. Sudah adanya instruksi Bupati tentang Biopori, Bank Sampah, Sekolah Adiwiyata dan Program Kampung Iklim. 5. Sudah ada pegawai berkompeten dalam menilai analisa mengenai dampak lingkungan 6. Sudah diakreditasinya laboratorium lingkungan.	1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan. 2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. 3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional 4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan 5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR); 6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
Kelemahan	**Tantangan**
1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH. 2. Banyak peralatan penanganana sampah dalam kondisi rusak; 3. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 4. Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan; 5. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan taman. 6. Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun; 7. Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi. 8. Belum dimilikinya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; 9. Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup; 10. Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian; 11. Belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL Pertamanan dan Kebersihan masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki; 12. Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi; 13. Masih banyak kebutuhan THL yang belum dipenuhi.	1. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. 2. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri. 3. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup. 4. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah, belum optimalnya ketersediaan ruang terbuka hijau serta belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 adalah 70,48 yang menurun sebanyak 0,94 dari capaian tahun 2020 sebesar 71,41. Secara garis besar, permasalahan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang terdiri dari belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air,

belum optimalnya pengendalian pencemaran udara, dan belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan. Belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air ditunjukkan pada indikator hasil pengukuran indeks kualias air serta indikator pengedalian potensi sumber pencemaran air yang relatif menurun. Pada tahun 2018, hasil pengukuran indeks kualitas air sebesar 54,62. Akan tetapi, selama lima tahun berikutnya besar hasil pengukuran mengalami fluktuasi dan pada tahun 2022 menjadi 53,11. Hal tersebut juga terjadi pada indikator pengedalian potensi sumber pencemaran air yang mengalami penurunan, dari tahun 2014 sebesar 50 persen menjadi 38 persen pada tahun 2022. Permasalahan kualitas air di Kabupaten Magelang disebabkan oleh degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan pemanfaatan sumber air yang berlebihan. Selain itu, di Kabupaten Magelang juga masih terdapat aktivitas yang menghasilkan limbah dan penggunaan bahan kimia yang menimbulkan polusi air. Adapun pada pengendalian pencemaran udara, upaya yang dilakukan sudah berhasil meningkatkan capaian hasil pengukuran indeks kualitas udara. Hanya saja, masih ditemukan polusi udara yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi. Adapun pada aspek pencemaran tanah/tutupan lahan, hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan penurunan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan adalah sebesar 76,74 dan terus menurun sampai dengan tahun 2022 menjadi 68,5. Belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan disebabkan oleh masih terdapat polusi tanah yang bersumber dari limbah pertanian, kebakaran hutan, dan bencana alam hidrometeorologi. Adapun terkait dengan belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah, baik limbah non B3 maupun limbah B3 disebabkan karena masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum mengelola limbah cair, udara, dan limbah B3 secara baik dan benar. Berdasarkan indikator Kabupaten Magelang, baru sekitar 50 persen pengelolaan limbah B3 yang terawasi. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya pemahaman usaha/kegiatan/masyarakat terkait limbah B3, terbatasnya pengelola limbah B3 yang mempunyai perijinan lengkap, belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3, perubahan pola hidup dan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan produksi limbah, keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan limbah B3 menjadi

penyebab belum optimalnya pengelolaan limbah. Permasalahan lainnya, yaitu belum optimalnya ketersediaan ruang terbuka hijau adalah dampak dari semakin berkurangnya lahan terbuka hijau baik berupa hutan, sawah, dan sejenisnya yang diakibatkan dari pembukaan

lahan untuk aktivitas industri, permukiman, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga permasalahan di sektor lingkungan hidup berupa belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan karena belum mengajukan perijinan lingkungan akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha. Hal tersebut tercermin dalam masih rendahnya capaian indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, capaian indikator ini sebesar 6,98 persen dan capaian tersebut menjadi yang tertinggi selama lima

Tujuan seluruh program pembanguan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri terangkum dalam gambaran kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat karena indikatornya yang mampu menggambarkan batas kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Indeks Pembangunan Manusia mampu menggambarkan tingkat pelayanan social (pendidikan dan kesehatan) dan ekonomi yang mampu diperoleh setiap individu serta menginterpretasikan keberhasilan program pembangunan yang telah dilakukan dalam membangun kualitas hidup manusia. Namun demikian dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan pengelolaan lngkungan hidup yang bijak.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahunn 2025 – 2030, daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang meliputi daya dukung air, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, dan daya daya dukung fungsi lindung. Adapun berkaitan dengan bencana dan kerentanan iklim, Kabupaten Magelang berada pada kategori risiko bencana tinggi untuk seluruh jenis bencana meliputi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Melihat kondisi tersebut, maka sudah menjadi menjadi keharusan bahwa tujuan akhir dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi risiko bencana. Permasalahan utama dicari dengan melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan visi misi dan program Bupati, telaahan renstra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah, telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis dan mempertimbangkan keadilan menggunakan analisa gender.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Berdasarkan penjabaran tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup memiiki tugas menyeleseikan permasalahan sesuai dengan tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Perlunya monitoring dan pelaporan GRK
		Perlunya laboratorium lingkungan yang kompeten
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK
		Perlunya monitoring rutin kualitas air
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran usaha kecil
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK
		Belum optimalnya jumlah sampel yang diperiksa
		Belum mencukupinya alat monitoring kualitas lingkungan
		Belum optomalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya kapasitas pengelola laboratorium
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium
		Belum optimalnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
		Perlunya sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3
		Belum optimalnya pengumpulan limbah B3 Covid 19
		Belum tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 medis
		Perlunya kerjasama dengan pengelola limbah B3
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan lingkungan hidup.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan belum berdokumen lingkungan
	Diperlukannya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas	Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah
		Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
	Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal	Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani
		Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati dokumen ijin lingkungan
	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Belum optimalnya kinerja penanganan sampah
		Belum optimalnya kinerja pengurangan sampah sampah

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
		Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang
		Perlunya pengembangan teknologi pengurangan sampah
		Belum optimalnya pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah
		lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pengolahan sampah
		Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
		Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pemilahan sampah
		Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah
	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Perlunya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Perlunya pengelolaan ruang terbuka hijau
		Perlunya penambahan luas RTH Publik dikelola
		Perlunya sarana prasarana tambahan untuk pengelolaan RTH
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
	Belum optimalnya adopsi kearifan local dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pelaksanaan konservasi daerah resapan air Perlunya peran serta masyarakat dalam konservasi mata air

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan kompetensi masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini
		Belum optimalnya penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim
		Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
	Belum optimalnya penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH
		Perlunya fasilitasi dan koordinasi lomba bersih sehat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Rencana strategis 2025-2026 merupakan murni rancangan teknokratis. Hal tersebut karena Bupati definitive belum ditetapkan. Oleh karena itu belum ada visi dan misi yang diemban sesuai denga RPD 2025-2026.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Tabel 3. 2 Telaahan Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025-2026

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan	Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan.	a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi	• Belum optimalnya pengelolaan sampah yang mengancam kualitas air maupun udara; • Masih terdapat sampah dari luar	• Belum diterapkannya imbal jasa lingkungan yang adil; • Belum optimalnya sosialisasi kewenangan penanggung jawab Penanganan dan	• Sudah dibuatnya perbup maupun raperbup pelaksanaan perda PPLH, • Sudah dibuatnya perbup kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.		lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan	daerah yang tidak dikelola dengan baik; • Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara; • Belum optimalnya pengelolaan limbah cair dan polutan udara terutama pada industri kecil dan UKM; • Kurangnya ruang terbuka hijau publik; • Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau; • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3;	Pengurangan sampah, • Mekanisme fasilitasi pengendalian pencemaran dan pengurangan sampah masih terbatas melalui hibah, • Belum adanya master plan dan kejelasan kewenangan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, • Belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup definitif, • Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah,	rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, • Sudah adanya regulasi penganggaran Dana Desa untuk pengelolaan lingkungan hidup, • Sudah ada profiling ruang terbuka hijau, • Sudah terakreditasinya laboratorium lingkungan.

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
				• Terbatasnya sarana laboratorium lingkungan.	
Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.	•	• Kurangnya areal angon lebah madu; • Belum terwujudnya Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kabupaten Magelang; • Belum optimalnya potensi pengembangan dan pemanfaatan Hutan Kota. • Belum optimalnya pertanian ramah lingkungan.	• Belum optimalnya sinkronisasi program Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang.	• Sudah ada lembaga msyarakat desa hutan, • Sudah terdapat contoh pemanfaatan lahan privat sebagai hutan kota.

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport.					
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem	•	•	• Perlunya konservasi daerah resapan air mendukung konsep Cawan Air Magelang; • Terdapat banyak daerah rawan bencana yang perlu dikonservasi; • Maraknya penambangan Bahan Material Gol C;	• Belum adanya pejabat penyidik negeri sipil lingkungan hidup, • Belum ada masterplan konservasi daerah resapan air, rawan bencana dan lahan kritis, • Belum ada master plan konservasi keanekaragaman hayati.	• Sudah ada profiling mata air, • Sudah ada peta rawa bencana, • Mulai dirintisnya komunitas penyelamat mata air, • Sudah ada pengawasan bersama penambangan bahan gol C.

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).			• Maraknya perburuan satwa terutama burung; • Masih terdapat penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan; • Masih terdapat potensi kebakaran hutan di Kabupaten Magelang; • Kurangnya Taman Keanekaragaman Hayati; • Belum optimalnya studi profil keanekaragaman hayati per eco-region khusus di Kabupaten Magelang.		

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
			• Belum optimalnya identifikasi sumber daya genetik lokal. • Perlunya membudayakan pengendalian dan mitigasi dampak perubahan iklim • Perlunya peningkatan pendidikan lingkungan hidup sejak dini. • Perlunya pengawasan pemakaian bahan perusak ozon.		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dibuat telaah permasalahan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana pada tabel 3.4.

Tabel 3. 3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
I	**RTRW**				
A	Struktur Ruang: 1. **Untuk mendukung Perwujudan struktur ruang dengan kebijakan dan strategi Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana tertulis dalam pasal 4 huruf a),** peran DLH tercantum secara jelas pada pasal 5 ayat (2) huruf d yakni “mengembangkan model desa konservasi dan pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk desa - desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi”;	• pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;	1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang mempengaruhi area layanan persampahan (sebelum diberlakukannya Perpres 97/2017) , Pengelolaan Ruang Terbuka Publik, ; 2. Tidak adanya pasal dalam Kebijakan Umum Zonasi (pasal 102) yang secara tegas memperuntukkan suatu kawasan	Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga deliniasi spasial antara Kawasan Perkotaan dan Perdesaan tidak menjadi masalah karena seluruh wilayah wajib dilayani. Tetapi dengan kewajiban ini harus ada peruntukkan yang jelas suatu kawasan sebagai Tempat Pengolahan Sampah	Keterbatasan dana dan sumber daya pengelola untuk mencapai daerah pegunungan dan*remote area.*

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	2. **Untuk mendukung Perwujudan struktur ruang dengan kebijakan dan strategi Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan sebagaimana tertulis dalam pasal 47 ayat (4) huruf a: Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran diprioritaskan sebagai:** Pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan. 3. **Untuk mendukung Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana pasal 4 huruf c, DLH turut menjalan kebijakan**	• pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan	dapat atau sebagai tempat Pengolahan Sampah;	karena besarnya timbulan sampah yang harus dilayani	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	pengelolaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana tertulis dalam pasal 11 huruf b yang dijabarkan dalam pasal 17 ayat (1) yakni 1. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan; 2. pengembangan dan pengoptimalan sistem sanitasi individual, komunal dan publik; 3. pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan air bersih; dan 4. pengembangan dan pengendalian prasarana limbah dan drainase.				
B.	**Pola Ruang** Pasal 83: Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (Pola Ruang Kawasan Budidaya) huruf b. Kawasan Ruang		1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	1.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Pasal 85 ayat (1) Kawasan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat 10%.		perencanaan pengelolaan RTH. 2. Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;		
C	**Indikasi Program**				
	1. peningkatan pengelolaan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah.		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
	2. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri		Belum optimalnya pengelolaan limbah industri	Sudah terdapat kawasan peruntukan industri berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2011	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum
	3. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja		Belum terkelolanya limbah tinja secara benar.	Sudah ada kajian evaluasi kualitas Sistem Pengelolaan Limbah Domestik.	Belum tersusun masterplan pengelolaan limbah tinja
	4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran		Belum optimalnya pengelolaan limbah kotoran hewan dan	Sudah ada percontohan pengelolaan limbah	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan limbah

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	hewan dan limbah rumah tangga perdesaan,		limbah rumah tangga perdesaan.	kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan secara benar.
	5. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya		Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
	6. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri		Belum optimalnya Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri	• Terdapat pemutakhiran data industri • Terdapat sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat penilai analisa dampak lingkungan	Belum memiliki komisi penilai analisa dampak lingkungan
	7. Pengembangan memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
II	**KLHS**				
	PILAR LINGKUNGAN				
	TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
1	Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai dan mata air untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem penyedia air.			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman buah dan aren.	
2	Peningkatan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbuhan dan resapan air tanah.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
3	Peningkatan resapan air melalui upaya-upaya sumur resapan, biopori dan pemanenan air hujan.			Telah dilaksanakan oleh desa-desa proklim.	
4	Meningkatkan indeks kualitas air melalui pengendalian usaha kegiatan yang dapat mencemari kualitas air.			Telah ada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan	Masih banyak usaha kecil yang belum memiliki IPAL.
5	Memfasilitasi pembentukan jaringan kelembagaan pengelola sumber daya air.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
6	Mendorong Provinsi untuk mengintegrasikan dokumen				Belum adanya RPLH Provinsi dan Kabupaten.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	RPDAST ke dalam perencanaan program.				
	TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
7	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif			Sudah ada percontohan sistem penanaman tumpangsari di daerah rawan bencana.	
8	Peningkatan penanganan sampah kabupaten sampai 70%.				Daerah yang bergunung-gunung mempersulit penanganan.
9	Pengurangan sampah di tingkat sumber sampai dengan 28%.			Sudah mulai banyak didirikan Bank sampah dan TPS3R.	
10	Pembukaan TPA baru untuk skala kabupaten dengan sistem controlled landfill atau teknologi lain yang lebih ramah				Sulinya mencari lahan yang sesuai untuk menjadi TPA

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	lingkungan dan mampu mereduksi sampah				
11	Meningkatkan penyediaan RTH di desa perkotaan.			Banyak lahan desa yang berpotensi menjadi RTH dikelola BUMDes.	
12	Optimalisasi koefisien dasar hijau pada kawasan permukiman				Kesulitan pengawasan UKL-UPL permukiman. Dan perumahan
	TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
13	Penyusunan master plan pengelolaan limbah B3 baik dari industri serta rumah sakit.				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
14	Penyusunan kajian kelayakan pengolahan limbah B3 oleh rumah sakit				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
15	Meningkatkan daur ulang sampah baik pada tingkat sumber maupun TPA dan/atau TPST sampai dengan 12,99%.		Belum adanya gerakan masif dan terstruktur pengelolaan sampah rumah tangga	Sudah terdapat instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Bank Sampah	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
16	Penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mereduksi sampah di TPA		Sampah belum terpilah dari hulu	Sudah terdapat perbup nomor 39 tahun 2018 tentang jakstrada pengelolaan sampah	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum
17	Peningkatan cakupan layanan sampah.		Keterbatasan anggaran	Kemungkinan penggunaan dana desa	Luas wilayah dan keterbatasan TPA
	TUJUAN 13: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
18	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim		Belum adanya RAD GRK		Belum adanya RPPLH Kabupaten
19	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.		Belum optimalnya sosialisasi	Sudah mulai terbentuk percontohan Desa Proklim Utama	
20	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif.			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi.	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
21	Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis sampai dengan 4,95%			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi, buah, dan aren.	
22	Mewujudkan tutupan hutan pada lahan kritis dan kawasan lindung sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Magelang agar dapat meningkatkan daya dukung fungsi lindung				Belum adanya masterplan konservasi
23	Meningkatkan ruang terbuka hijau.		• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
			kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;		berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;
24	Menyediakan dokumen kerangka legislasi administrasi untuk pembagian keuntungan terhadap akses sumber daya alam yang adil dan merata.				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
25	Penyusunan dokumen rencana pemanfataan keanekaragaman hayati			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
26	Penyusunan indikator indeks keanekaragaman hayati dan pemantauan tahunan			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

3.5 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gender merupakan salah satu isu dalam pembangungan berkeadilan. Isu gender merupakan isu pelayanan publik terutama pada kesetaraan sesuai kemampuan dan haknya. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, penyusunan rencana strategi juga perlu melakukan telaah isu gender dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hasil telaahan analisa gender sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3. 4 Gender analysis pathway dalam pengelolaan lingkungan hidup

PERMASALAHAN PARADIGMA GENDER	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Desa - Kota	Perbedaan jenis pelayanan persampahan	Terbatasnya daerah pelayanan masih di wilayah perkotaan	• Sudah dimulai kesadaran pengurangan sampah dari sumber melalui Bank Sampah dan TPS3R
Jenis Kelamin	Petugas pengelola sampah dan ruang terbuka hijau didominasi oleh laki-laki	• Stigma pengelolaan sampah rumah tangga hanya kewajiban wanita/ibu, • Stigma kewajiban penghijauan hanya untuk kaum lelaki. • Sebagian besar pekerja lapangan di DLH adalah lelaki.	
Usia	Perlunya usaha penyadaran pengelolaan lingkungan hidup sejak dini		Mulai tumbuh program Adiwiyata, saka kalpataru dan pemuda penyelamat lingkungan.
Industri Besar - UKM	Perbedaan jenis tindakan terhadap pelaku usaha kegiatan yang melanggar pengelolaan lingkungan hidup	• Pembinaan terhadap UKM dalam mengelola lingkungan kurang optimal • Kurangnya jumlah pengawas lingkungan hidup.	

3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat dari berbagai aktivitas manusia perlu diimbangi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi di Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik. Adapun masalah pokok perangkat daerah adalah **belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan.**

Telaahan terhadap tugas pokok fungsi, visi misi Bupati, Renstra kementerian dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, RTRW dan KLHS dan Analisa Gender dalam pelayanan DLH menghasilkan berbagai masalah dan akar masalah. Masalah dan akar masalah dimaksud dapat dirangkum menjadi isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan, baik air, udara dan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Belum optimalnya pengendalian sumber gas rumah kaca,
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup baik sumber daya DLH maupun masyarakat dan dunia usaha.
4. Belum optimalnya Tata kelola lingkungan hidup, sejak perencanaan daerah, usaha dan atau kegiatan dan juga penegakan hukum lingkungan.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dari hulu penghasil sampah sampai dengan hilir di pengolahan sampah akhir.
6. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan privat.
7. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam, berupa air, tanah dan keanekaragaman hayati.
8. Belum optimalnya pengendalian dan mitigasi perubahan iklim, dalam hal pengenalan ancaman perubahan iklim hingga langkah nyata pengendalian dan mitigasinya.

Pengelolaan lingkungan hidup saling berkaitan dan sulit untuk membuat rumusan isu khusus, namun demikian tetap perlu untuk membuat isu strategis yang fokus. Berdasarkan telaah tugas pokok fungsi DLH terutama unit-unit DLH, pokok masalah tersebut lebih difokuskan menjadi.

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca,
2. Belum optimalnya kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup,
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,
4. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,
5. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

Beberapa hal isu strategis yang perlu diwaspadai adalah adanya target Kebijakan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Persampahan. DLH Kabupaten Magelang harus segera membuat persiapan

menyesuaikan perubahan target pengelolaan sampah. Saat ini Kondisi TPA Pasuruan dalam kondisi sudah melebihi kapasitas daya tampung sampah. Hal tersebut perlu diantispasi dengan penguatan program dan kegiatan di bidang penanganan maupun pengurangan sampah.

Kebijakan nasional lain yang perlu untuk disikapi adalah tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang juga telah menjadi indikator tujuan Renstra. Perlu untuk fokus pada program dan kegiatan pencegahan pencemaran air karena Indeks Kualitas Air kita masih rendah. Laboratorium perlu difasilitasi dengan alat pemantauan kualitas udara untuk mengukur indeks kualitas udara kita secara standar.

Kabupaten Magelang harus terus aktif mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim. Program dan Kegiatan DLH juga dalam rangka mengurangi timbulan emisi gas rumah kaca. Antisipasi dampak perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui program Adipura, ProKlim dan Adiwiyata.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, manajemen pengelolaan data, dan kemudahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perlu untuk membuat Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Sistem yang dibangun hendaknya berbasis daring dan geospasial. Program dan kegiatan sistem informasi lingkungan juga merupakan pendukung kebijakan smart city.

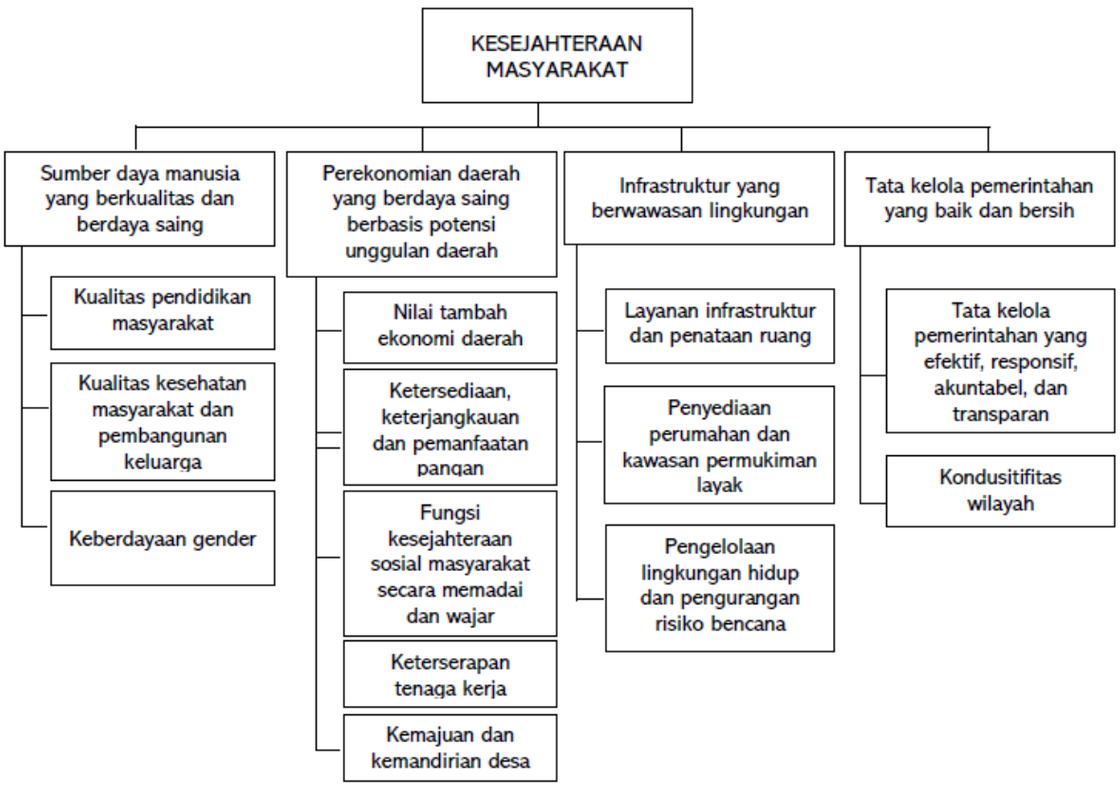
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2025 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) terutama urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan DLH. RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 merupakan murni rancangan teknokratik. Pada RPD 2025-2026 belum ada visi dan misi Bupati definitive.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode tahun 2025-2026. Tujuan ini akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini, tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah karena tidak adanya visi misi kepala daerah. Isu strategis daerah sendiri disimpulkan dari isu strategis lingkungan (isu global, nasional, dan regional), permasalahan daerah, serta potensi daerah.

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan maka dibangun kinerja pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2025-2026 sebagai berikut:



Logframe Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Perwujudan kesejahteraan tersebut didukung oleh empat tujuan dan dua belas sasaran, yaitu

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meliputi
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
   b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga;
   c. Meningkatnya keberdayaan gender;
   d. Meningkatnya literasi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran meliputi
   a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah;
   b. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
   c. Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar;
   d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;
   e. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan dengan sasaran meliputi
   a. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang;
   b. Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak;
   c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
   d. Berkurangnya resiko bencana
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan sasaran meliputi
   a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan;
   b. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

Rencana strategis 2025-2026 DLH mengacu pada logframe tersebut dengan menempatkan sasaran daerah menjadi tujuan perangkat daerah. Sasaran Daerah yang menjadi Tujuan Perangkat Daerah DLH adalah MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Target capaian		Kondisi Akhir
					2025	2026	
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan. berkeselamatan, dan berkelanjutan			Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan	%	71,72	74,30	74,30
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	65,81	65,82	65,82
		Meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	%	62,11	63,04	63,04
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	angka (0-100)	41,76	41,98	41,98
			Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	36,23	39,13	39,13

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian program. Strategi yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Strategi disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan tujuan yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada permasalahan isu strategis yang ada. Strategi diharapkan sebagai solusi mencapai tujuan yang menyokong visi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2025-2026 adalah Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Magelang Tahun 2023, kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang berada pada kondisi sedang. Indeks kualitas air berada pada kondisi rendah. Rendahnya kualitas air sejalan dengan isu strategis yang ada yaitu masih belum terkelolanya sampah dengan baik, belum optimalnya pengendalian pencemaran dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain mengacu pada solusi permasalahan, strategi yang dilaksanakan juga harus menjadi cara mewujudkan visi Bupati dan searah dengan program prioritas Bupati. Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu strategi konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan lingkungan hidup, perlu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis keletarian lingkungan sebagai masalah pokok perlu diseleseikan dengan kerja cerdas, keras dan ikhlas. Dalam perubahan rencana strategis ini terdapat penambahan strategi menyesuaikan dengan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019. Strategi yang ditambahkan mengambil beberapa kebijakan yang perlu untuk ditingkatkan penanganannya secara lebih serius. Setiap strategi menyeleseikan satu masalah perangkat daerah. Strategi dijabarkan dengan program yang memiliki satu atau lebih indikator capaian kinerja.



Gambar 5. 1 Inovasi penguatan kearifan lokal peningkatan kapasitas Komunitas Jogo Tuk

5.2 Kebijakan

Rumusan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kegiatan kerja. Kebijakan yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Kebijakan disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan sasaran yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada akar permasalahan atas isu strategis yang ada. Kebijakan diharapkan sebagai solusi mencapai sasaran perangkat daerah yang menyokong misi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2014-2019 adalah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu strategi konservasi sumber daya alam perlu dilaksanakan dengan selaras peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan upaya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan terhadap usaha menengan dan besar, pengawasan dan penegakan hukum, fasilitasi terhadap usaha kecil, dan pemberian apresiasi terhadap pelaku pengelola lingkungan hidup yang baik. Untuk meningkatkan kualitas hidup terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, perlu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

Tabel 5. 1 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS
1. Belum optimalnya daya saing daerah
2. Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah
MISI 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	Belum optimalnya kinerja layanan lingkungan hidup	Meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap sumber pencemar
					Mengoptimalkan monitoring rutin dan pelaporan GRK
					Meningkatkan kompetensi laboratorium lingkungan
					Meningkatkan pembinaan terhadap sumber pencemar udara
					Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK
					Melakukan monitoring rutin kualitas air
					Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar air
					Meningkatkan pengendalian pencemaran usaha kecil

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Meningkatkan pengawasan terhadap sumber GRK
					Meningkatkan jumlah sampel yang diperiksa Meningkatkan ketercukupan alat monitoring kualitas lingkungan Mengoptimalkan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
					Meningkatkan kapasitas pengelola laboratorium
					Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium
					Mengoptimalkan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
					Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
					Melakukan sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan
			Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	Peningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
					Meningkatkan pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Meningkatnya pembinaan pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3
					Membina dan memfasilitasi pengumpulan limbah B3 Covid 19
					Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 medis
					Melaksanakan kerjasama dengan pengelola limbah B3
			Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
					Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
					Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
					Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup
			Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas	Menyusun perencanaan dan kajian lingkungan hidup yang baik	Mengoptimalkan pelaporan kinerja pengelolaan LH daerah

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Penggunaan KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
			Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal	Penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup	Meningkatkan penanganan aduan lingkungan
					Meningkatkan ketaatan terhadap dokumen ijin lingkungan para pelaku usaha dan/atau kegiatan
			Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Optimalisasi kinerja penanganan sampah
					Optimalisasi kinerja pengurangan sampah
					Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
					Mengembangkan teknologi pengurangan sampah
					Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengurangan sampah Optimalisasi kinerja pengurangan sampah
					Pemanfaatan teknologi dalam pengurangan sampah

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah
					Meningkatkan pengolahan sampah
					Meningkatkan fasilitas pengolahan sampah
					Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah
					Meningkatkan pemilahan sampah
					Mengoptimalkan pembatasan timbulan sampah
			Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keanekaragamanhayati
					Mengoptimalkan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau
					Penambahan RTH publik yang dikelola
					Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
					Meningkatkan pemeliharan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
			Belum optimalnya adopsi kearifan local dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengakuan dan Pembinaan terhadap Masyarakat hukum adat, kearifan lokal terkait. Dan inovasi terkait PPLH	Meningkatkan konservasi sumber daya air melalui kegiatan vegetatif dan sipil teknis
					Meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi mata air
			Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan kompetensi masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatkan pendidikan lingkungan hidup sejak dini
					Meningkatkan penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Meningkatkan konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
			Belum optimalnya penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Pemberian penghargaan terhadap masyarakat dan/atau individu pengelola lingkungan hidup	Memfasilitasi kegiatan penghargaan lingkungan hidup
					Memfasilitasi dan mengkoordinasikan lomba bersih sehat

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

6.1 Rencana Kinerja dan Pendanaan

Program kerja yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas Lingkungan Hidup. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggungjawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyeleseikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus, dan APBD Provinsi melalui Bantuan Gubernur. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti program Bank Pohon.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat nomenklatur sub kegiatan untuk lebih memfokuskan target kinerja. Sub kegiatan diampu oleh satu unit kerja setingkat eselon IV/Pengawas. Dalam hal satu sub kegiatan diampu oleh lebih dari satu unit kerja setingkat eselon IV, harus ada pembagian jelas tanggJenis program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup beserta indikasi dana dan kinerjanya sesuai dengan tabel 6.1.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip money follow program sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang kabinet, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma money follow function menjadi money follow program. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait. Penyusunan Rencana Kerja ini sudah disinkronkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategi 2025-2026 dan Penyusunan Draft Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi unsur di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	**11**				**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**					**23.103.744.326**		**21.965.386.717**		**45.069.131.043**
					Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)**	**70,48 (ANGKA 0-100)**	**65,80 (ANGKA 0-100)**	**65,81 (ANGKA 0-100)**	**23.103.744.326**	**65,82 (ANGKA 0-100)**	**21.965.386.717**	**65,82 (ANGKA 0-100)**	**45.069.131.043**
					Meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup	**Indeks Kinerja Pengelolaan sampah**	**42,43**	**41,64**	**41,76**	**23.103.744.326**	**41,98**	**21.965.386.717**	**41,98**	**45.069.131.043**
						Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin, persetujuan, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	**11,36%**	**33,33%**	**36,23%**		**39,13%**		**39,13%**	
						Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	**41,15%**	**60,25**	**62,11**		**63,04**		**63,04**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.226.441.326**	**100 %**	**10.068.965.717**	**100 %**	**20.295.407.043**
						Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.053.000**	**100 %**	**6.440.000**	**100 %**	**13.493.000**
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.203.000	1 Dokumen	2.012.000	2 Dokumen	4.215.000
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	3.613.000	23 Laporan	3.299.000	46 Laporan	6.912.000
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.237.000	5 Laporan	1.129.000	10 Laporan	2.366.000
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan OPD**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.700.147.326**	**100 %**	**9.557.038.717**	**100 %**	**19.257.186.043**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	102 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	9.645.466.326	88 Orang/Bulan	9.507.108.717	88 Orang/Bulan	19.152.575.043

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	54.681.000	14 Laporan	49.930.000	14 Laporan	104.611.000
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.969.000**	**100 %**	**5.450.000**	**100 %**	**11.419.000**
2	11	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	103 Dokumen	100 Dokumen	90 Dokumen	5.969.000	88 Dokumen	5.450.000	88 Dokumen	11.419.000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54.911.000**	**100 %**	**50.139.000**	**100 %**	**105.050.000**
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali	132 Laporan	50 Laporan	54.911.000	50 Laporan	50.139.000	50 Laporan	105.050.000
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketercapaian pengadaan barang kantor**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**20.000.000**
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	10 Unit	10.000.000
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	16 Unit	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	2 Unit	10.000.000
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian pelayanan jasa penunjang perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**106.767.000**	**100 %**	**106.179.000**	**100 %**	**212.946.000**
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13521 Surat	12 Laporan	12 Laporan	6.767.000	12 Laporan	6.179.000	12 Laporan	12.946.000
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	192 Laporan	180 Laporan	100.000.000	180 Laporan	100.000.000	180 Laporan	200.000.000
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang penunjang milik daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**341.594.000**	**100 %**	**333.719.000**	**100 %**	**680.313.000**
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	19 unit	19 unit	250.975.000	19 unit	255.975.000	19 unit	511.950.000
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	15 Unit	2 Unit	1.691.000	2 Unit	1.544.000	2 Unit	3.235.000
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	26 Unit	9.850.0000	26 Unit	8.994.000	26 Unit	18.844.000
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.383.000	1 Unit	3.089.000	1 Unit	6.472.000
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	4 Unit	1 Unit	75.695.000	1 Unit	69.117.000	1 Unit	144.812.000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**88.742.000**	**100%**	**81.030.000**	**1**	**169.772.000**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**25.635.000**	**100 %**	**23.407.000**	**100 %**	**49.042.000**
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.635.000	1 Dokumen	23.407.000	1 Dokumen	49.042.000
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**63.107.000**	**1 Dokumen**	**57.623.000**	**1 Dokumen**	**120.730.000**
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	63.107.000	1 Dokumen	57.623.000	1 Dokumen	120.730.000
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**33,71 %**	**33,71%**	**33,71%**	**369.270.000**	**33,71%**	**337.182.000**	**33,71%**	**706.452.000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau**	**43 Usaha/ Kegiatan**	**43 Usaha/ Kegiatan**	**40 usaha/kegiatan**	**209.622.000**	**40 usaha/kegiatan**	**191.407.000**	**40 usaha/kegiatan**	**401.029.000**
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	76.364.000	1 Dokumen	69.728.000	1 Dokumen	146.092.000
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	18.168.000	1 Dokumen	16.590.000	1 Dokumen	34.758.000
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 Dokumen	201 Dokumen	201 Dokumen	115.090.000	210 Dokumen	105.089.000	411 Dokumen	220.179.000
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi**	**11 Parameter**	**14 Parameter**	**14 Parameter**	**126.731.000**	**16 Parameter**	**115.718.000**	**16 Parameter**	**242.449.000**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	2 Pelatihan	200 Laporan	210 Laporan	126.731.000	210 Laporan	115.718.000	210 L Laporan	242.449.000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan								
2	**11**	**03**			**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemulihan yang terlaksana**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**32.917.000**	**1 Paket**	**30.057.000**	**1 Paket**	**62.974.000**
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	0 Paket	1 dokumen	1 dokumen	32.917.000	1 dokumen	30.057.000	1 dokumen	62.974.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH Publik yang terkelola**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.846.799.000**	**100 %**	**1.686.320.000**	**100 %**	**3.533.119.000**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas RTH yang dikelola**	**12,75 Ha**	**19,9 Ha**	**22,1 Ha**	**1.846.799.000**	**22,1 Ha**	**1.686.320.000**	**22,1 Ha**	**3.533.119.000**
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket	12, 75 Ha	22,1 Ha	1.452.467.000	22, 1 Ha	1.326.254.000	1 Paket	2.778.721.000
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Paket	61 unit	59 unit	394.332.000	59 unit	360.066.000	1 Paket	754.398.000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)***	**100 %**	**100%**	**100%**	**213.519.000**	**100%**	**194.965.000**	**100%**	**408.484.000**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Persentase usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan**	**100 %**	**100%**	**100%**	**36.886.000**	**100%**	**33.681.000**	**100%**	**70.567.000**
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	36.886.000	5 Dokumen	33.681.000	5 Dokumen	70.567.000
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah limbah B3 yang dikelola**	**5 Ton**	**5 ton**	**10 ton**	**176.633.000**	**10 ton**	**161.284.000**	**10 ton**	**337.917.000**

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Dokumen	176.633.000	1 Dokumen	161.284.000	1 Dokumen	337.917.000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan**	**59,42 %**	**63,87%**	**63,87%**	**37.370.000**	**63,87%**	**34.122.000**	**63,01%**	**71.492.000**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan dokumen lingkungan**	**100 %**	**100%**	**100%**	**37.370.000**	**100%**	**34.122.000**	**100%**	**71.492.000**
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100 %	10 Dokumen	5 Dokumen	29.080.000	5 Dokumen	26.553.000	5 Dokumen	55.633.000
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Peserta	20 Laporan	12 Laporan	8.290.000	12 Laporan	7.569.000	12 Laporan	15.859.000
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan konservasi jogo tuk**	**11,53 %**	**14,49%**	**16,16%**	**75.288.000**	**17%**	**68.746.000**	**17%**	**144.034.000**
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**30.555.000**	**1 Dokumen**	**27.900.000**	**1 dokumen**	**58.455.000**

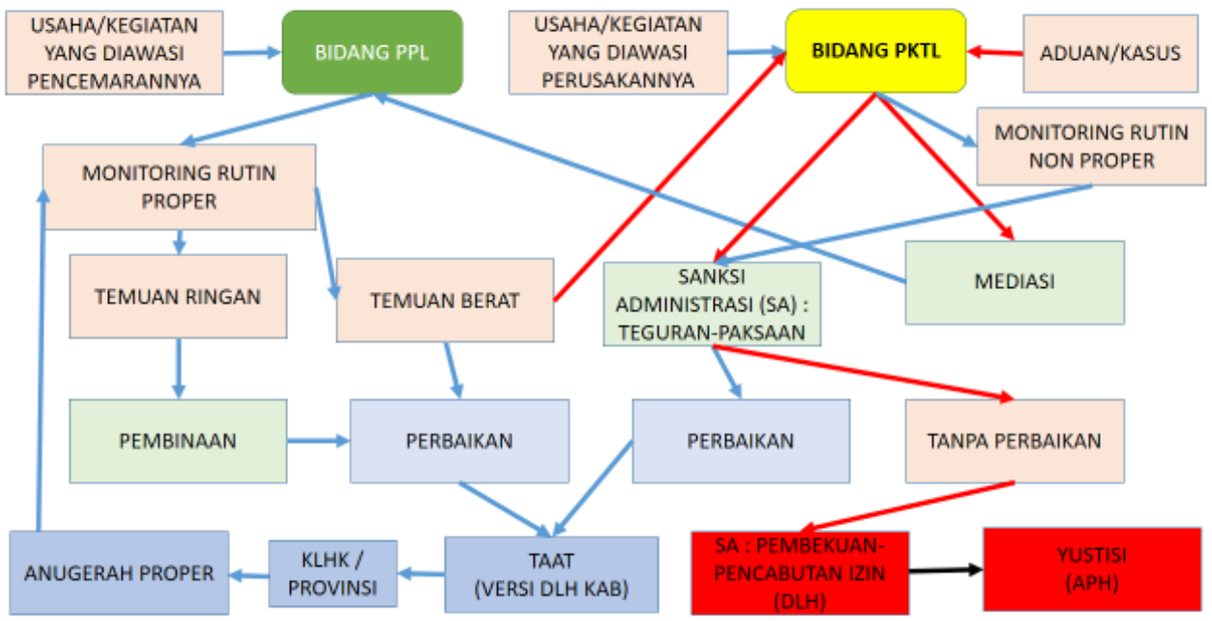
Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.555.000	1 Dokumen	27.900.000	1 dokumen	**58.455.000**
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah komunitas mata air yang dibentuk**	**25 Komunitas**	**10 Komunitas**	**5 komunitas**	**44.733.000**	**5 komunitas**	**40.846.000**	**5 komunitas**	**85.579.000**
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	25 Komunitas	10 Komunitas	5 komunitas	44.733.000	5 komunitas	40.846.000	5 komunitas	85.579.000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup**	**25,78 %**	**25,73%**	**34,52%**	**76.933.000**	**38,31%**	**70.248.000**	**38,31%**	**147.181.000**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi**	**15 Sekolah/ Desa**	**15 Sekolah/Desa**	**15 Sekolah/Desa**	**76.933.000**	**15 Sekolah/Desa**	**70.248.000**	**15 Sekolah/Desa**	**147.181.000**
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Paket	10 Dokumen	10 Dokumen	36.943.000	10 Dokumen	33.733.000	10 Dokumen	70.676.000
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Kali	20 Lembaga	20 Lembaga	39.990.000	20 Lembaga	36.515.000	20 Lembaga	76.505.000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**42.381.000**	**100 %**	**38.699.000**	**100 %**	**81.080.000**

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan**	**Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**42.381.000**	**1 Paket**	**38.699.000**	**1 Paket**	**81.080.000**
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	6 Entitas	6 Entitas	42.381.000	6 Entitas	38.699.000	6 Entitas	81.080.000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**17.003.000**	**100 %**	**15.525.000**	**100 %**	**32.528.000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**17.003.000**	**100 %**	**15.525.000**	**100 %**	**32.528.000**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	13 Aduan	15 Aduan	5 Aduan	8.121.000	5 Aduan	7.415.000	4 Aduan	15.536.000
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	10 Surat	10 Dokumen	5 Surat	8.882.000	5 Surat	8.110.000	5 Surat	16.992.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**	**53,5%**	**51,16%**	**54,99%**	**10.109.998.000**	**56,49%**	**9.369.584.000**	**56,49%**	**19.479.582.000**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R**	**19,35 %**	**24,1**	**25,00%**	**10.109.998.000**	**26,50%**	**9.369.584.000**	**26,50%**	**19.479.582.000**
						Persentase jumlah sampah yang tertangani	**%**	**27,06**	**29,99%**		**29,99%**		**29,99 %**	**-**
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.015.000	1 Dokumen	9.145.000	1 Dokumen	19.160.000
2	11	11	2.01	00019	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	252 laporan	252 laporan	252 laporan	360.379.000	252 laporan	329.064.000	252 laporan	689.443.000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		43800 Ton	53109,33	2.863.666.000	105580,5	2.614.826.000	105580,5	5.478.492.000
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		65.411,78 Ton	85496,16 Ton	4.925.724.000	62418,65 Ton	4.466.335.000	62418,65 Ton	9.392.059.000
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	6 Unit	1 Unit	1.950.214.000	1 Unit	1.950.214.000	1 Unit	3.900.428.000
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	Ton	Ton		Ton		Ton	
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	%	%		%		%	

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan cara mengendalikan pembangunan dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. *Amar ma'ruf* dilaksanakan dengan mengajak konservasi sumber daya alam, mengelola sampah dengan benar agar menjadi berkah, mendidik masyarakat dan anak sekolah mengelola lingkungan serta berusaha mengelola ruang terbuka hijau. *Nahi munkar* dilaksanakan melalui membina dan mengawasi penaatan aturan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, polusi dan sumber gas rumah kaca serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penaatan lingkungan hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPKL) dan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan (PDPLL) melaksanakan tugasnya dengan sasaran dan aturan jelas mengacu standar berdasar ketaatan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.



Gambar 6. 1 Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup

6.2 Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

6.2.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Pengertian Pembangunan berkelanjutan menurut UU 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa diperlukan perencanaan yang memadu serasikan terhadap tiga unsur utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam pengertian UU 32 tahun 2009 di sebut RPPLH yang diartikan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu

Sedangkan dalam kerangka pembangunan tentunya akan membutuhkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk melaksanakanya. Pada era otonomi saat ini, hal itu diartikan bahwa perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu perangkat daerah (OPD) dan ditetapkan dalam bentuk perda. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun kegiatan RPPLH Kabupaten/kota yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup (PDPL) DLH Kab. Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan RPPLH (NA RPPLH). Kegiatan evaluasi terhadap RPPLH yang telah disusun dan ditetapkan dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan dalam wujud penyajian Indeks Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Sebagai bentuk domestifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Peraturan presiden ini, menegaskan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan TPB. Implementasi TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah

terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembanguan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan lingkungan hidup (PDPL) DLH Kab. Magelang.

6.2.2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub kegiatan “Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dalam sub kegiatan ini

dianggarkan untuk koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dalam pembentukan kelompok peduli sungai, monitoring pengendalian pencemaran limbah cair, dan udara, pengujian kualitas air di Kabupaten Magelang.

Kegiatan untuk monitoring kualitas air sungai di Kabupaten Magelang, sesuai amanat Perundang-undangan dan peraturan di bidang lingkungan antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Tujuan Monitoring Kualitas Air adalah pengumpulan informasi tentang kualitas air sungai-sungai di Kabupaten pada interval yang teratur dalam periode musim kemarau dan penghujan, data pengujian ini digunakan untuk menentukan kondisi pada saat kini dan menetapkan kecenderungan kualitas air sesuai dengan standar lingkungan.

Tabel 6. 2 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Airnya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA
1	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH (AMANJIWO)	Ds. Majaksingi, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Hotel Amanjiwo
2	HOTEL SARASWATI BOROBUDUR	Jl.Balaputra Dewa 10 Ngaran lor, Borobdur, Magelang	Hotel
3	HOTEL CATUR PUTRA	Jl. Mayor Jend. Bambang Sugeng 308 Mertoyudan	Penginapan
4	ARMADA TOWN SQUARE	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 1 Dsn. Saragan, Ds. Banyurejo, Mertoyudan, Kab. Mgl	Plaza dan Hotel
5	HOTEL LOSARI COFFE PLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	Losari, Grabag, Magelang	Hotel
6	NING TIDAR HOTEL	Ketanggan, Banjarnegoro, Mertoyudan	Hotel
7	THE ORCHID GUEST HOUSE	Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, km. 2,1 Pasaranya,r Sumberrejo, Mertoyudan, Kab. Magelang	penginapan
8	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Dsn. Tunjangan dan Dsn. Maitan, Ds. Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Jasa Pariwisata (Hotel Resort, Restaurant, Lounge dan SPA)
9	UD. SARI JAYA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10 Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pengolahan Gagang Cengkeh dan Kemenyan

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA
10	PT. PALMAS PRIMA INDONESIA	Jl. Purworejo-Magelang KM.12 Dsn Tanggulrejo Tempuran	Industri Pembuatan Sabun
11	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Tanggulrejo, Tempuran, Magelang	Industri Obat Tradisional sari Sehat
12	CV. BESTONE INDONESIA	Jl. M. Yusuf No 8, Pucungrejo Muntilan, Magelang	Kerajian Batu Alam
13	PT. ANUGERAH METALINDO GEMILANG	Dsn. Turus, Ds. Tumpurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pembangunan Usaha Kerajinan dari Logam
14	PT. ALAM DAYA SAKTI	Dsn. Dukuhan, Ds. Bojong, Kec. Mungkid , Kab. Magelang	Indusri Pembuatan Pavling Blok Dan Batako
15	CV. TRI SAKTI	Ds. Jogomulyo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Karoseri
16	KAROSERI AVENA	Jl. Letnan Tukiyat Randugunting, Blondo, Mungkid, Magelang	Karoseri
17	CV. ARCON	Sidoagung, Tempuran, Magelang	Pembuatan Genteng Pres
18	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Jambu,Tempurejo, Tempuran,Magelang	Perusahaan Tenun
19	PT. RETOTA SAKTI	Jati Lor, Tonoboyo, Bandongan	Kerajinan tenun
20	PT. PANDATEX	Jl. Magelang-Purworejo km. 10, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran	Industri Textil
21	PT. DJOHAR	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 9,5, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil
22	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Jl. Raya Magelang Jogja Km. 12 Dsn. Gadingan, Bojong, Mungkid	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg
23	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7, Ds. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Industri Karoseri
24	PT. PUTRA AGUNG SETIA (Karoseri Agustus)	Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang	Industri Karoseri
25	CV. ANUGERAH	Jl. Raya Secang-Magelang Km 8 Kec. Secang, Kab. Mgl	Industri Karoseri
26	CV. NEW SENTOSA	Jl. Kyai H. Sirat Km. 16, Dsn. Bangsren, Ds. Kricing, Kec. Secang, Kab. Magelang	Pembangunan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus
27	PT. NASMOCO	Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km. 5, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pembangunan Bengkel dan Showroom Kendaraan Roda Empat
28	CV. KURNIA KULIT ABADI	Dsn. Kedon, Ds. Pasuruhan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Industri Penyamakan Kulit
29	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Jl. Pakelan-Bandongan, kedungingas, Bulurejo, kec. Mertoyudan	Industri Penyamaan Kulit
30	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Dsn. Kwangsan, Ds. Kedungsari, Kec. Bandongan, Kab. Magelang	Penjemuran sisik Ikan
31	PT. CIOMAS ADI SATWA	Jl. KH. Maksum RT 02/RW 04 Dsn, Kiringan, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran	Pemotongan Hewan
32	PT. SIDOAGUNG FARM	Jl. Magelang Purworejo Sidoagung Tempuran, Kab. Magelang	Industry Makanan Ternak

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA
33	UNGGAS JAYA MITRA	Dsn. Turus, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran	Peternakan ayam
38	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Jl. Munggur No.2, Dsn. Kalangan Wetan, Desa Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Keripik Singkong
34	CV. RAMIN MINERAL	Dsn. Panggaron Lor, Ds. Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang	Agrobisnis Peternakan Terpadu
35	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Jl.Raya Magelang-Purworejo Km.9, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
36	PT. PAPERTECH INDONESIA	Jl. Anggrahan - Gatak No. 23 Ds. Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Kertas Karton
37	KLINIK RAWAT JALAN SAMADIYAH-USUP	Jl. Raya Magelang-Jogja Km. 13 RT 01 RW 016, Dsn. Batikan, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan
39	KLINIK YOGA DARMA	Jl. Pahlawan No. 26, Dsn. Prajenan, Ds. Mertoyudan, kab. Magelang	Klinik
40	CV. GUMUK WALIK MEDIKA	Jl. Rejosari No.1. Ds. Grabag Kec.Grabag Kab.Magelang	Klinik Pengobatan & Rumah Bersalin
41	BKIA AISYIYAH MUNGKID	Dsn. Citran, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan kesehatan
42	LABORATORIUM PRAMITA	Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan
43	CV. JOYO BOYO PLASTIK	Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10, Dsn. Jambu, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pengolah Bijih Plastik
44	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 24, Dsn. Kendal Growong, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang	Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat
45	RS. PADMA LALITA	Jl. Klangon Km 1 Muntilan	Rumah Sakit
46	RSU KAB. MAGELANG	Jl. Kartini No. 13 Kelurahan Muntilan	Pelayanana Kesehatan
47	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Dsn. Nuren, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang	Jasa Pelayanan Kesehatan
48	RSUD Merah Putih	Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Magelang
49	RSU N-21 GEMILANG	Jl. Pondok Pabelan No. 5 Batikan, Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan
50	KLINIK BEDAH RAWAT INAP MULYA HUSADA	Jl. Tentara pelajar No. 11 Dsn. Sidoarjo, Ds. Tamanagung, Muntilan	Pelayanan Kesehatan

Tabel 6. 3 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Udaranya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA
1	PT. MITRA KAYU SEJATI	Jl. Purworejo, Telogosari, Margoyoso	Pengolahan kayu sengon
2	INDUSTRI KAROSERI AVENA	Jl. Letnan Tukiyat, Blondo, Mungkid	Karoseri
3	CV. SENGON PERKASA	Tlogosari, Margoyoso, Salaman	Perdagangan Barang Kayu Olahan (Laminating Board)
4	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Dsn. Demesan, Ds. Girirejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pembangunan Pabrik Garment
5	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Jambu,Tempurejo, Tempuran,Magelang	Perusahaan Tenun
6	PT. PANDATEX	Jl. Magelang-Purworejo km. 10, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran	Industri Textil
7	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Jl. Magelang Purworejo Km 11. Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang	Pengolahan Kayu Sengon
8	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7, Ds. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Industri Karoseri
9	CV. ANUGERAH	Jl. Raya Secang-Magelang Km 8 Kec. Secang, Kab. Mgl	Industri Karoseri
10	PT. CITRA SENGON PERKASA	Jl. Magelang-Purworejo Km 23 Margoyoso, Salaman Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
11	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu
12	CV. NEW SENTOSA	Citra Manggisan Kalijoso, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Karoseri
13	CV. PANCA DAYA KARTIKA	Jl. Raya Grabag-Blender kwijilan Grabag Kec. Grabag Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu
14	PT. SIDOAGUNG FARM	Jl. Magelang Purworejo Sidoagung Tempuran, Kab. Magelang	Industry Makanan Ternak
15	UD. SEMBODO JOYO	Dsn. Kenayan, Ds. Ngabean, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Pupuk Organik
16	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Ds.n. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
17	CV. TRI SAKTI	Ds. Jogomulyo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Karoseri
18	PT. PODOREJO SUKSES	Dsn. Tempurejo Ds. Girirejo Kec. Tempuran Kab. Magelang	Pabrik Kopi Bubuk
19	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang	Industri Karoseri Agustus
20	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT II	Jl Raya Magelang-Secang, Dsn. Sempu, DS. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
21	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT I	Jl Raya Magelang-Secang, Ds. Krincing, Kec Secang, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA
22	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Jl.Raya Magelang-Purworejo Km.9, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
23	CV. SIDO DADI	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 22, Ds. Kaliabu, Kec. Salaman, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
24	CV. SEMBODO JOYO	Dsn. Kenayan Ds. Ngabean Kec. Secang Kab. Magelang	Pembangunan Industri Pengolahan Kayu
25	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA DAN MEKAR JAYA ABADI	Dsn. Batikan RT 02 RW 15, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
26	CV. AGUS JATI	Dsn. Tanggulboyo, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelng	Industri Pengolahan Kayu
27	PT. KAYU LIMA UTAMA	Jl. Raya Magelang - Yogya km 7, Dsn. Randugunting, Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
28	CV. NEW SENTOSA	Jl. Kyai H. Sirat Km. 16, Dsn. Bangsren, Ds. Kricing, Kec. Secang, Kab. Magelang	Pembangunan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus
29	PT. KRETYA ALAM INDUSTRI	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
30	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 11, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu
31	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Jl. Munggur No.2, Dsn. Kalangan Wetan, Desa Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Keripik Singkong
32	PT. PAPERTECH INDONESIA	Jl. Anggrahan - Gatak No. 23 Ds. Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Kertas Karton
33	PT. DASAR KARYA UTAMA	Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10, Kel. Tempuran, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Payung dan pengolahan Kayu
34	PT. DJOHAR	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 9,5, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil

Fenomena pemanasan global telah menunjukkan Indonesia pada posisi kontributor emisi gas rumah kaca yang cukup besar sekaligus penerima dampak. Peran dan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai dengan 29 % menggunakan sumberdaya dalam negeri dan 12 % dengan kerjasama internasional di tahun 2030 tidak akan berhasil tanpa peran pemerintah daerah dan kota. Kota / atau dan kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk secara geografis merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca sekaligus yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak fenomena ini akan menimbulkan permasalahan pada ketersediaan pangan, udara, air bersih, dan energi menjadi prioritas yang perlu mendapatkan perhatian setiap tahunnya.

Kabupaten Magelang yang pembangunannya ditunjang oleh pertanian, agroindustri dan industri juga menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang cukup signifikan. Hal ini juga ditunjang perubahan iklim yang menyebabkan berbagai bencana di kabupaten ini. Untuk itulah maka Kabupaten Magelang berkomitmen untuk melakukan upaya identifikasi dan perhitungan emisi GRK dan menganalisa profil iklim sebagai langkah awal untuk menetapkan aksi daerah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem Inventarisasi Emisi Gas GRK Nasional sebagai langkah penyusunan aksi daerah dalam menyikapi perubahan iklim global.

Cuaca ekstrim, perubahan curah hujan dan perubahan suhu udara merupakan dampak fenomena perubahan iklim yang paling berpengaruh di Kabupaten Magelang. Profil iklim telah mengidentifikasi dampak fenomena perubahan iklim yang telah terjadi sebelumnya diberbagai wilayah dalam kabupaten ini. Dampak perubahan iklim ini sangat mempengaruhi di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana. Fenomena perubahan iklim yang menjadi prioritas adalah yang masuk kategori tinggi, yaitu :

1) Meningkatnya kejadian penyakit endemik (diare, ISPA, DBD dan malaria),
2) Terganggunya sistem ketahanan pangan karena meningkatnya serangan OPT/Organisme Penganggu Tanaman (tikus, tungro, PBP, bule) pada padi dan hortikultura serta
3) Meningkatnya kejadian bencana alam (tanah longsor, kebakaran, angin kencang dan banjir) .

Profil iklim ini menuntut Kabupaten Magelang untuk menempatkan prioritas dari sisi :

1) peningkatan sistem pelayanan kesehatan terutama pada penyakit DBD dan Chikungunya,
2) Sistem ketahanan pangan untuk menangani serangan hama dan penyakit padi dan hortikultura, dan
3) Sistem Pengelolaan Bencana Alam. Kegiatan penanganan dan antisipasi terhadap perubahan iklim merupakan aktifitas yang harus terintegrasi oleh multisektoral dengan komitmen yang tinggi dari berbagai elemen di dalam pemerintah Kabupaten.

Dinas lingkungan hidup memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional. Beberapa parameter matriks air sudah terakreditasi sehingga dapat membantu bidang dan usaha kegiatan yang melaksanakan pemantauan lingkungan. Sebelas parameter sudah terakreditasi dan ditargetkan 15 parameter terakreditasi pada akhir periode renstra untuk beberapa matriks pengujian. Daftar rencana akreditasi parameter sebagaimana tabel 6.4.

Peran laboratorium lingkungan hidup diharapkan dapat lebih optimal. Pemanfaatan kemampuan laboratorium lingkungan dalahm hal pengawasan dan penentuan rona awal usaha dan/atau kegiatan diharapkan dapat ditingkatkan. Saat ini laboratorium lingkungan belum mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Diharapkan dapat mulai untuk mempersiapkan menambah kemampuan pengujian yang diakreditasi sehingga dapat mengajukan registrasi paling tidak saat di assesment ketiga pada Tahun 2023.

Tabel 6. 4 Rencana akreditasi parameter UPTD Laboratorium Lingkungan DLH

NO	JENIS MATRIK PENGUJIAN	TAHUN													
			2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
1	Air Permukaan	1	Suhu	1	Suhu	1	Suhu	1	Suhu	1	Suhu	1	Suhu	1	Suhu
		2	pH	2	pH	2	pH	2	pH	2	pH	2	pH	2	pH
		3	TSS	3	TSS	3	TSS	3	TSS	3	TSS	3	TSS	3	TSS
		4	TDS	4	TDS	4	TDS	4	TDS	4	TDS	4	TDS	4	TDS
		5	Nitrit	5	Nitrit	5	Nitrit	5	Nitrit	5	Nitrit	5	Nitrit	5	Nitrit
		6	Amoniak	6	Amoniak	6	Amoniak	6	Amoniak	6	Amoniak	6	Amoniak	6	Amoniak
				7	COD	7	COD	7	COD	7	COD	7	COD	7	COD
												8	DHL	8	DHL
												9	Kekeruhan	9	Kekeruhan
														10	T Coli
2	AIR LIMBAH			1	pH	1	pH	1	pH	1	pH	1	pH	1	pH
				2	TSS	2	TSS	2	TSS	2	TSS	2	TSS	2	TSS
				3	Amoniak	3	Amoniak	3	Amoniak	3	Amoniak	3	Amoniak	3	Amoniak
				4	COD	4	COD	4	COD	4	COD	4	COD	4	COD
												5	Nitrit	5	Nitrit
														7	T Coli
JUMLAH		6		11		11		11		11		13		15	



Gambar 6. 2 Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai unit pelaksana teknis yang membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Magelang memiliki tugas dalam pengujian Laboratorium parameter kualitas lingkungan. Diharapkan kegiatan pengujian di laboratorium dapat berlangsung secara maksimal, dan berkualitas maka laboratorium harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2017.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020 tentang Laboratorium Lingkungan pasal 1(4) bahwa Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi.

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Nomor LP-1004-IDN. parameter ruang lingkup yang sudah terakreditasi : Suhu, TSS, TDS, Amonia , Nitrit COD untuk air permukaan , danTSS, PH,COD, Amonia untuk Air Limbah. Sedangkan parameter yang bisa diuji di UPTD Laboratorium Lingkungan belum masuk ruang beberapa parameter Kimia Fisika yaitu : Bau, Kekeruhan, DHL, BOD, DO, Fosfat, Nitrat, Amonia, Sulfat, Kesadahan, Besi, Klorida serta Total Coliform dan Fecal Coli untuk parameter mikrobiologi,

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menjadi Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu menambah parameter ruang lingkup Akreditasi KAN sebagai syarat mendapatkan identitas registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu perlu dipersiapkan penjaminan mutu berupa kecukupan sarana dan prasarana yang berstandar dan terkalibrasi serta beberapa hal yang dipersyaratkan dalam pengajuan registrasi . Diharapkan dengan menjadi Laboratorium Lingkungan yang teregistrasi, dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap hasil uji laboratrorium yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

6.2.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dan daerah terbuka. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai peran di antaranya dapat menyediakan kualitas lingkungan udara sehat, ruang untuk kenyamanan hidup dan interaksi sosial serta untuk mempercantik estetika lingkungan perkotaan. Memenuhi kentetuan UU No 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebesar 30 % dari luas wilayah, dengan proporsi paling sedikit 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) difokuskan pada pengelolaan taman keanekaragaman hayati yang bias diakses public. untuk Pada Tahun 2025 direncanakan pemanfaatan pengelolaan RTH di sekitar perkotaan Mertoyudan dan Secang. Pada tahun 2025 juga diusahakan penetapan luasan RTH yang sesuai dengan kondisi real perkotaan pada Perda RTRW yang baru.

6.2.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tahun Anggaran 2023, Sub Kegiatan ini bertujuan inventarisasi Data Limbah B3 secara Elektronik yang di kelola sesuai ketaatan, dan sosialisasi bagi usaha / kegiatan yang belum mempunyai ijin pengelolaan limbah B3 (TPS B3) yang dihasilkan dalam proses produksi, hal ini sesuai dengan amanat peraturan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

operasional untuk pelayanan pengumpulan limbah medis B3 dan sampah spesifik. Sesuai Instruksi Presiden agar pengolahan limbah medis Covid-19 dilakukan secara intensif dan sistematis, dan memastikan kecepatan dan solusi dari permasalahan limbah B3 Medis Covid-19 dari hulu ke hilir secara tuntas serta ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Dari data timbulan limbah Medis Covid-19 di Kabupaten Magelang dari Januari s/d Desember Tahun 2021 dari Fasyankes jumlah limbah mencapai total kurang lebih 80 Ton, dengan rata-rata timbulan limbah harian 250 kg/hari, di Kabupaten Magelang belum memiliki sarana prasrana pengelolaan limbah B3 medis, selama ini limbah B3 Medis covid-19 dari fayankes langsung dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagai transporter untuk dibawa ke pemusnah, sedangkan timbulan limbah covid-19 selain dari fasyankes belum terkelola dengan baik, seperti dari Isolasi Mandiri dan Terpusat sebagian masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dibakar, dibuang sembarangan dll.

Berdasar latar belakang diatas, untuk melaksanakan pelayanan pengumpulan Limbah Medis Covid-19 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai leading sektor, menimbang permasalahan luasan wilayah Kabupaten Magelang yang besar maka dalam efisiensi anggaran tahun 2024 merencanakan strategi pelayanan prioritas dalam cakupan di 5 wilayah pelayanan 3 Perkotaan dan 2 Pedesaan yaitu Kec. Mertoyudan, Kec. Muntilan, Kec. Borobudur, Kec. Mungkid dan Kec. Tempuran.

6.2.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, melalui subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup, DLH Kab. Magelang, memfasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup meliputi Pemeriksaan UKL-UPL/DPLH bagi kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL/DPLH, Pendaftaran Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Izin Lingkungan serta Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah Melaksanakan kebijakan teknis analisis dampak lingkungan hidup dan pengawasan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Adapun Tujuan Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Memberikan petunjuk teknis, pedoman dan tata cara penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan hidup serta Persetujuan Lingkungan;
2) Memberikan petunjuk teknis, pedoman dan tata cara penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL;
3) Peningkatan Kapasitas SDM Tim Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Kabupaten Magelang dalam rangka membahas tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
2) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka mendukung program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satu upaya dalam mengawasi suatu usaha danatau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan lingkungannya.

Selain pengawasan aktif, diharapkan juga pelaksanaan pengawasan pasif berdasarkan laporan rutin dokumen lingkungan. Saat ini persentase pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasar dokumen lingkungan hidup yang dimiliki usaha dan kegiatan termasuk kurang. Diharapkan adanya peningkatan pemberian sanksi dan pengawasan bagi usaha yang kurang aktif melaporkan pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan pengawasan baik aktif maupun pasif diharapkan terdapat 10 usaha dan/atau kegiatan yang mentaati pengelolaan pencemaran udara dari 34 usaha dan/atau kegiatan target. Selain

itu diharapkan terdapat 19 usaha dan/atau kegiatan mentaati pengendalian pencemaran air dari 50 usaha dan/atau kegiatan yang ditarget.

Saat pelaksanaan pengawasan oleh Bidang PPL, bila terdapat temuan berat tanpa usaha perbaikan bisa dilimpahkan ke Bidang PKTL untuk melaksanakan sanksi administrasi. Semua pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilengkapi dengan berita acara. Usaha dan atau kegiatan lain berskala UKL-UPL dan AMDAL dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Bidang PKTL.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
f) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
g) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

6.2.6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh

Mata air merupakan salah satu sumber air potensial yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nilai penting mata air bukan hanya dari kualitasnya saja, namun juga penting dari aspek kuantitas. Sebagai gambaran, dari seluruh air yang ada di bumi, air tawar yang bisa dimanfaatkan hanya 3% saja. Sekitar 30% dari air tawar tersebut, hanya 0,3% yang dapat dimanfaatkan langsung dalam bentuk air permukaan. Air tanah sebagai sumber mata air mempunyai potensi paling besar yaitu 30% air tawar yang ada di bumi.

Nilai penting mata air lainnya bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Mata air yang berada di pegunungan pada umumnya mempunyai kualitas yang sangat baik, sehingga hal ini menjadi daya tarik para pelaku usaha untuk memanfaatkannya. Berbagai produk air minum dalam kemasan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan air mata air secara ekonomi.

Lokasi dengan potensi mata air juga menjadi daya tarik terbentuknya peradaban sejak dahulu kala. Pusat-pusat peradaban dunia dan kota-kota besar pada umumnya berlokasi dekat dengan sumber air, khususnya mata air. Salah satu contohnya adalah pusat kota kerajaan romawi yang sangat

bergantung pada 23 mata air di dekatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mata air mampu menggerakkan kehidupan sosial dan perkembangan budaya.

Secara ekologis, pentingnya mata air ditunjukkan oleh peran mata air yang mempengaruhi kelestarian ekosistem akuatik maupun non-akuatik yang berada di bawahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata air merupakan sistem penyangga ekosistem di bawahnya.

Ke depan, peningkatan kebutuhan air baku sebagai akibat pesatnya pembangunan dan pertambahan penduduk merupakan salah satu ancaman. Di sisi lain, tatanan normal baru juga menuntut agar sumber air baku khususnya mata air, memiliki kualitas lebih baik serta kuantitasnya cukup dan tersedia sepanjang waktu.

Perlindungan mata air secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memulihkan, menjaga serta melindungi mata air dan air yang dihasilkannya, baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Konsep perlindungan mata air mempunyai spektrum keruangan yang lebih luas, tidak hanya daerah sekitar titik mata air saja, tetapi juga meliputi seluruh Daerah Tangkapan Air (DTA) mata air (*springshed*).

Perlindungan juga dapat dilihat dari sudut pandang infrastruktur dan kawasan. Perlindungan mata air berupa infrastruktur pada intinya adalah perlindungan melalui struktur bangunan, misalnya bangunan penampung air. Sudut pandang kawasan merujuk perlindungan mata air secara spasial, baik sekitar titik mata air maupun DTA mata air.

Dari sudut pandang apapun, zonasi secara spasial untuk upaya perlindungan mata air perlu didefinisikan. Secara sederhana pembagian zona perlindungan setidaknya terdiri atas: titik lokasi mata air berada, daerah sekitar mata air, dan Daerah Tangkapan Air (DTA) mata air (*springshed*). Setiap zona perlindungan memiliki karakteristik dan tujuan perlindungan yang spesifik, sehingga hal ini menjadi dasar penentuan strategi perlindungan yang dapat dilaksanakan.

Pemahaman tentang mata air merupakan kunci dalam perlindungan mata air itu sendiri. Informasi penting yang berhubungan dengan pemahaman mata air setidaknya meliputi proses kejadian mata air, karakteristik aliran, sifat fisika dan kimia air, dan prediksi DTA nya. Pengetahuan tentang karakteristik mata air sangat penting sebagai dasar strategi perlindungannya, termasuk untuk menentukan prediksi DTA mata air.

Proses kejadian mata air tidak terlepas dari beberapa kondisi yang memengaruhinya. Setidaknya terdapat tiga kondisi yang memengaruhi kemunculan mata air, yaitu kondisi morfologi, kondisi geologi dan kondisi hidrogeologi. Karakterisasi mata air sering digunakan untuk mengetahui proses kejadian mata air, diantaranya berdasarkan sifat pengaliran air tanah, debit air, suhu air, tipe akuifer, tenaga penyebab pengaliran air tanah dan tipe material akuifer.

Pemahaman hasil air, baik kualitas maupun kuantitas adalah salah satu sarana untuk mengetahui proses yang terjadi di DTA mata air, karena mata air dapat menggambarkan integrasi proses geologi dan hidrologi pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi karakteristik air mata air dapat digunakan untuk memprediksi besarnya imbuhan air tanah, memprediksi asal air mata air, memprediksi karakteristik material permukaan dan menentukan prediksi luas DTA.

Tingkat kedalaman pemahaman mata air akan sangat tergantung pada kedalaman data yang dimiliki. Semakin lengkap data yang dimiliki, baik secara

spasial maupun temporal, maka pemahaman akan semakin komprehensif dan akurat. Terlepas dari berbagai keterbatasan data dan informasi yang berkaitan dengan mata air, pendekatan praktis sangat diperlukan.

Pemahaman praktis ini didasarkan pada proses kemunculan mata air. Pertama, mata air yang keluar secara horizontal. Di Jawa, mata air ini dikenal sebagai istilah *umbul lanang* (mata air laki-laki). Mata air ini memiliki karakteristik mengalir ke permukaan secara horizontal.

Pada umumnya mata air ini mempunyai akuifer yang dangkal, berasal dari air tanah pada akuifer tidak tertekan dan memiliki sistem aliran bersifat lokal. Hasil air secara kuantitatif sangat dipengaruhi oleh perubahan musim, dengan kata lain akan berfluktuasi sesuai musim atau input air hujan. Secara kualitas termasuk sedang, dan aktivitas manusia di atasnya akan sangat berpengaruh. Penentuan DTA mata air ini dapat memanfaatkan pendekatan batas-batas morfologi.

Kedua, mata air yang keluar ke permukaan secara vertikal ke arah atas, atau dikenal juga sebagai *umbul wadon* (mata air wanita). Mata air ini mempunyai ciri berasal dari akuifer tertekan yang dalam, mempunyai sistem aliran regional, dan kondisi geologi sangat berperan di sini.

Perubahan musim tidak memengaruhi debit mata air secara signifikan, begitu pula halnya aktivitas manusia. Kualitas air yang dihasilkan pada umumnya mempunyai kualitas yang baik. Penentuan DTA mata air ini memerlukan pendekatan yang cenderung lebih rumit dan data pendukung yang lebih banyak, diantaranya dengan menggunakan pendekatan *tracer test* dan menggunakan batas-batas geologi.

Untuk lingkungan gunung api, pola penyebaran mata air di lereng gunungnya dapat menjadi petunjuk yang penting. Pola sejajar (sabuk mata air/*spring belt*) mengindikasikan mata air berasal dari akuifer berbeda, kualitas/kuantitas variatif, dan pada umumnya dikontrol oleh morfologi. Pola radial (*radial spring*) terjadi karena adanya pemotongan topografi pada batuan/akuifer yang sama, lebih dikontrol oleh faktor geologi, asal air tanah dan kualitas relatif sama.

Maksud kegiatan ini adalah untuk perlindungan dan konservasi mata air. Tujuan Kegiatan adalah untuk mendapatkan jumlah, lokasi, debit dan pemanfaatan mata air Kabupaten Magelang yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga diketahui fluktuasi debit mata air tersebut, serta salah satu masukan dalam menganalisis awal dampak pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar mata air dan factor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi debit mata air.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Secara umum dikarenakan keterbatasan modal finansial eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mengundang intervensi pemodal besar sebagai investor, antara lain dengan dalih akan mampu memberikan manfaat dalam bentuk pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin di sekitarnya. Akan tetapi skema seperti ini dari banyak pengalaman justru berkontribusi besar merusak tatanan masyarakat adat yang banyakhidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam.Pola seperti ini menghadap-hadapkan masyarakat adat dengan pemilik modal dan pemerintah sebagai fasilitator di lapangan. Namun, berbagai kasus telah membuktikan, bahwa pembangunan meneruskan semangat kolonialisme dengan merampas tanah masyarakat adat, melakukan peminggiran dan merusak pola produksi

dan tatanan politik masyarakat adat. Hal ini kemudian membuat gerakan masyarakat adat muncul dan menguat(Yance, 2010).

Program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dalam level lebih operasional, pembagunan melalui proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan, yang artinya adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas. Untuk mewujudkan pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan yang dapat memperlancar baik proses transformasi dan transisi dari paradigma lama ke paradigma baru, maupun dalam menjabarkan konsep pemberdayaan sebagai pendekatan yang digunakan sebagai perspektif baru dalam kegiatan yang lebih operasional. Menurut Soetomo (2011), implementasi konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan, yaitu: reorientasi, gerakan sosial, institusi lokal dan pengembangan kapasitas.

Paradigma baru pembangunan kehutanan yang telah memberikan penekanan pada “Community Based Development” yaitu pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal atau masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dalam hal ini perlu ada penataan sistem kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan, karena sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat sehinggabenar-benar mempercepat difusi danadaptasi untuk secara aktif berperan serta dalam pengembangan hutan. Dengan demikian penataan sistem kelembagaan dengan tepat akan memberikan keleluasan bagi pertumbuhan peran serta, tanggungjawab dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Kartasasmita, 1997; Sulistyani, 2004; Andriyanidkk., 2017). Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar yang berperan sebagai pendamping masyarakat (Graha, 2009).

Maksud kegiatan ini adalah menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tujuan dari kegiatan pada program tersebut adalah:

1) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
2) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan,
3) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih,
4) Membudayakan kesadaran lingkungan,
5) Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah.
6) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
7) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
8) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
9) Mengantisipasi isu lingkungan global.

6.2.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup merupakan gabungan dari kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya di Sekolah (PBLHS) atau sekolah Adiwiyata. Kegiatannya meliputi : rapat koordinasi kegiatan, sosialisasi ke masyarakat dan sekolah, bimtek verifikasi EDS (Evaluasi Diri Sekolah) Adiwiyata,. Kegiatan ini mendukung program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sasarannya adalah seluruh Masyarakat di Kabupaten Magelang.

Program Adiwiyata adalah salah satu Program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan para stakeholders, adapun dasar pelaksanaan program Adiwiyata adalah UU 32 th 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Peraturan Menteri LH Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Peraturan Menteri LHK Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Nota Kesepahaman antara Menteri LHK, Mendikbud, Menristek Dikti, Menag & Mendagri No: PK2/7/2016,99/VII/NK/2016,11a/M/NK/2016, 9 th 2016, 660/2688A/SJ ttg Pengembangan Pendidikan Lingkungan, Instruksi Bupati No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Dalam rangka pelaksanaan program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pembinaan dan seleksi di daerah serta pengusulan penerimaan penghargaan. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan kepada masyarakat maupun kepada warga sekolah di Kabupaten Magelang. adapun tujuan kegiatan adalah:

1) Mengurangi Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi
4) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
5) Terbentuknya Sekolah Adiwiyata
6) Membudayakan Kesadaran Lingkungan
7) Diberikan penghargaan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup merupakan Program Kampung Iklim (ProKlim). Kegiatannya meliputi : rapat koordinasi kegiatan, sosialisasi ke masyarakat dan sekolah, bimtek calon Desa Proklim, Pendampingan Penyusunan Excel SRN Proklim, Pendampingan Penyusunan Dokumen Pendukung Proklim, verifikasi SRN (System Registry Nasional) Proklim. Kegiatan ini mendukung program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidp untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sasarannya adalah seluruh Masyarakat di Kabupaten Magelang.

Proklim sendiri merupakan salah satu kegiatan dari Kementrian Lingkungan Hidup Sesuai Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Permen LHK Nomor 84/2016 tentang Program Kampung Iklim, PerDirjen PPI Nomor P1./2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Proklim, PerDirjen PPI Nomor P.5/2017 tentang

Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Masyarakat, No.P7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, No.P4/PPI/SET/KUM.1/2/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, maka Pemerintah memberikan penghargaan bagi warga masyarakat yang telah berjasa luar biasa dalam hal PPLH.

Dalam rangka pelaksanaan program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pembinaan dan seleksi di daerah serta pengusulan penerimaan penghargaan. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan kepada masyarakat dan melakukan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak dengan cara memberikan sosialisasi dan pembinaan di Desa dan atau Kelurahan di Kabupaten Magelang. adapun tujuan kegiatan adalah:

1) Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi
4) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
5) Memperkecil atau mengurangi banjir dan kekeringan
6) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
7) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
8) Membudayakan Kesadaran Lingkungan
9) Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah
10) Membuat Kompos alami dari sampah organic
11) Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit
12) Mengurangi penyebab pemanasan Global di tingkat tapak
13) Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor.

6.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Duni Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan program pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga lingkungannya.Kegiatan meliputi rapat coordinator Tim, Sosialisasi Lomba dan Penilaian Desa Bersih Sehat.

Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Duni Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yakni mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.Untuk itu perlu menupayakan Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Sadar Kesejahteraan, Masyarakat Berdaya dan Sejahtera.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukungKegiatan LBS dikarenakan masyarakat berperan penting dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R (Reuse, Reduce dan Recycle), dan partisipasi langsung oleh masyarakat berupa kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu perlunya pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagai stimulant dalam hal pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan baik kepada masyarakat maupun

kepada warga melakukan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak dengan cara memberikan sosialisasi. Tujuan adalah :

1) Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
4) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
5) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
6) Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit
7) Diberikan penghargaan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria

6.2.9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Magelang dalam rangka membahas permasalahan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang di sampaikan oleh masyarakat melalui prosedur pengaduan masyarakat dan temuan oleh bidang lain ketika melakukan kegiatan dan ada dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
2) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota dilakukan untuk mendukung program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota adalah media untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Selain itu kegiatan ini juga menindaklanjuti temuan oleh bidang lain di DLH ketika melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permasalahan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang di lakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan (ketidaktaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan) yang ada di wilayah Kabupaten Magelang.
2) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka mendukung program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan adalah media untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (ketidak taatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan ketika melakukan kegiatan di wiayah Kabupaten Magelang). Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;

7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

6.2.10 Program Pengelolaan Persampahan

Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas lingkungan Hidup pada rencana strategis mengacu pada Perbup Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama bidang dan UPTD Pengelolaan Sampah. Bidang bertanggungjawab terutama pada pengurangan sampah dan penyediaan sarana pengelolaan sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan melalui Bank Sampah dan TPS3R baik di Desa, Sekolah dan Kawasan. UPTD bertanggungjawab terutama untuk penanganan sampah.menjadi kerja besar bagi penanganan sampah akibat penuhnya TPA Pasuruan, perlu untuk merevitalisasi TPSS dan Rumah Kompos. Diharapkan pasar dan kawasan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara optimal. TPSS direvitalisasi dengan penjagaan, penjadwalan dan pemilahan optimal.

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pegelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai penyusunan dokumen jakstrada (data timbulan sampah, data sarana prasarana pengelolaan sampah, data lingkungan hidup) di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang. Dokumen Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025 dan mendukung pencapaian target Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. JAKSTRADA sendiri merupakan turunan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Aturan ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan 32 Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, asosiasi, dan komunitas terlibat dalam pengelolan sampah nasional. Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK telah menetapkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasar berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Maksud kegiatan adalah terwujudnya data / dokumen kebijakan dan strategi daerah yang baik. Tujuan Kegiatan adalah terwujudnya lingkungan

yang bersih, rapi serta meningkatnya prosentase pengurangan sampah di Kabupaten Magelang .

Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai Langkah Pengurangan Sampah dari sumbernya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang dibantu adanya fasilitator di semua Kecamatan yang memberi pembelajaran terkait pengelolaan sampah dengan prinsip 3R(reduce,reuse,recycle) ke masyarakat tingkat Dusun, Desa maupun Kecamatan dengan harapan dapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baru yang kemudian membentuk Bank Sampah - Bank Sampah Tingkat Dusun / Desa, Bank Sampah Sektoral Tingkat Desa, Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan, Bank Sampah Kantor maupun Sekolah serta TPS 3R berbasis masyarakat berupa Sosialisasi, Pembinaan, Perlombaan serta Gerakan Pungut Sampah (GPS) di berbagai kelompok masyarakat. Hal-hal tersebut diatas mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya edukasi ke masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbemya yang masuk pada Indikator Pengurangan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang. Kegiatan pengelolaan ini mendukung program Pengelolaan Persampahan dan sasarannya adalah Masyarakat Kabupaten Magelang

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali merupakan Kegiatan yang melingkupi berbagai Sosialisasi Pengurangan Sampah dari sumbemya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang dibantu adanya fasilitator di semua Kecamatan yang memberi pembelajaran terkait pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle) ke masyarakat tingkat Dusun, Desa maupun Kecamatan berupa Sosialisasi, Pembinaan, Perlombaan serta Gerakan Pungut Sampah (GPS) di berbagai kelompok Hal-hal tersebut mencerminkan upaya edukasi ke masyarakat masyarakat. dalam pengelolaan sampah dan sumbernya yang masuk pada Indikator Pengurangan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang.

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai Langkah Penanganan Sampah dari sumbernya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang. Dengan adanya fasiltas penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, Bank Sampah Induk serta pengadaan kontainer sampah diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di Kabupaten Magelang.

Hal-hal tersebut diatas mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi pengelolaan sampah dari sumbernya yang masuk pada Indikator Pengurangan serta penanganan sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang. Kegiatan pengelolaan ini

mendukung program Pengelolaan Persampahan dan sasarannya adalah Masyarakat Kabupaten Magelang

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kegiatan yang melingkupi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menganangi sampah yang ada di Kabupaten Magelang, Pengadaan tanah untuk perluasan lahan di TPA Pasuruhan dan TPA Klegen. Hal-hal tersebut mencerminkan upaya penanganan sampah yang termasuk pada Indikator Pengurangan/Penyediaan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang.

6.3 Pengelolaan Resiko

Lingkungan pengendalian adalah kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap manajemen organisasi yang sehat. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan resiko,beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun.

Tabel 7. Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**													
	1.1.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH												
	1.1.1.Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksanaan	Tidak sinkronnya RPPLH Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah	ROO 24.11.02.01	Bidang PDPL	Belum ditetapkannya RPPLH Provinsi Jawa Tengah	Eksternal	UC	Penyusunan ulang jadwal penetapan RPPLH	PEMDA	2	2	7
	1.1.2.Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak tersampaikannya kinerja PPLH ke masyarakat	ROO 24.11.02.02	Bidang PDPL	Kurangya informasi yang diberikan kepada Masyarakat	Eksternal	UC	Timbulnya persepsi negatif masyarakat	PEMDA	2	2	7
	1.2.Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten												
	1.2.1.Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksanaan	KLHS Rencana Tata Ruang terlambat disusun	ROO 24.11.02.03	Bidang PDPL	KRP dari OPD terkait terlambat disusun	Eksternal	UC	Kegiatan berkaitan dengan KLHS menjadi terhambat	PEMDA	3	3	14
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**													
	2.1.Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau Profil Gas Rumah Kaca yang tersusun												
	2.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan	Lamanya penerbitan persetujuan teknis	ROO 24.11.02.04	Bidang PPKL	Adanya perubahan SOP dan revisi dokumen yang terlalu lama	Eksternal	UC	Terhambatnya perijinan berusaha bagi usaha/kegiatan	Masyarakat, DLH	3	4	16

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	2.1.2.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Dokumen inventarisasi GRK tidak berkualitas dan/atau terlambat disusun	ROO 24.11.02.05	Bidang PPKL	Data laporan GRK pelaku industri tidak tersedia	Eksternal	UC	Pengendalian GRK tidak digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan	Masyarakat, DLH	3	3	14
	2.1.3.Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pelaksanaan	Rendahnya kualitas pengujian laboratorium	ROO 24.11.02.06	UPTD Laboratorium Lingkungan	Reagen bahan lab yang kadaluarsa dan alat yang belum dimiliki serta sebagian alat mengalami kerusakan	Internal	C	Tidak terpenuhinya jumlahj dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium	UPTD Laboratorium Lingkungan , Masyarakat	2	3	10
	2.2.Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi pencegahan pencemaran yang dibuat												
	2.2.1.Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak tersampaikan pada masyarakat	ROO 24.11.02.07	UPTD Laboratorium Lingkungan	Kekurangan SDM karena personil laboratorium dengan Kompetensi pengujian Mikrobiologi mengundurkan diri	Internal	C	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kurang dari target yang ditetapkan	DLH, Masyarakat	2	2	7
	2.3.Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemulihan yang terlaksana												
	2.3.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Kurangnya penghentian sumber pencemar; Tidak terlaksananya kegiatan penghentian sumber pencemar	ROO 24.11.02.08	Bidang PPKL	Pemilik sumber pencemar kekurangan anggaran penghentian sumber pencemar; Data Inventarisasi Sumber Pencemar tidak tersedia	Eksternal	UC	Masih terjadinya pencemaran lingkungan;	Masyarakat	3	4	16

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**													
	3.1.Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan keanekaragaman hayati yang dikelola												
	3.1.1.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	RTH publik tidak terkelola dengan baik	ROO 24.11.02.09	Bidang PKKLH	Kurangnya SDM pengelola RTH publik	Internal	C	RTH publik menjadi terbengkalai	Masyarakat, DLH	2	3	10
	3.1.2.Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pelaksanaan	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati tidak terpelihara dengan baik	ROO 24.11.02.10	Bidang PKKLH	Kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Internal	C	Rusaknya sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Masyarakat, DLH	3	2	11
4	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**													
	4.1.Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan												
	4.1.1.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaksanaan	Waktu pembenahan dokumen yang lama	ROO 24.11.02.11	Bidang PPKL	Kurangnya pengetahuan pengelola LB3 terhadap aturan pengelolaan LB3	Eksternal	UC	Persepsi pengurusan izin pengelolaan limbah B3 menjadi buruk	DLH	2	3	10
	4.2.Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket limbah B3 medis yang ditangani												

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	4.2.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Pelaksanaan	petugas rawan tertular penyakit	ROO 24.11.02.12	Bidang PPKL	Tidak menggunakan perlengkapan yang memadahi	Internal	C	Limbah B3 tidak terkumpul dan tersimpan dengan baik	DLH	2	3	10
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**													
	5.1.Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup Persentase pemenuhan dokumen lingkungan												
	5.1.1.Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Pelaksanaan	Keterlambatan penerbitan persetujuan PPLH sebagai dasar perizinan berusaha	ROO 24.11.02.13	Bidang PDPL	Kurangnya pemenuhan persyaratan pengajuan persetujuan PPLH	Eksternal	UC	Persepsi pengurusan persetujuan PPLH menjadi buruk	Masyarakat, DLH	3	3	14
	5.1.2.Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pelaksanaan	Tidak sesuai antara izin yang di terbitkan dengan keadaan di lapangan	ROO 24.11.02.14	Bidang PDPL	Kelalaian pelaku industri dalam pengelolaan lingkungan	Eksternal	UC	Pencemaran lingkungan	Masyarakat, DLH	4	3	17

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
6	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**													
	6.1.Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat												
	6.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pelaksanaan	Peserta pelatihan kurang dari kuota	ROO 24.11.02.15	Bidang PKKLH	Waktu pelatihan di jam kerja	Internal	C	Jumlah komunitas jogo tuk yang terbentuk kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
	6.2.Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk												
	6.2.1.Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Pelaksanaan	Kualitas informasi profiling komunitas jogo tuk kurang informatif	ROO 24.11.02.16	Bidang PKKLH	Konsultan pelaksana profiling kurang memahami kerangka acuan kerja profiling mata air	Eksternal	UC	Data profiling komunitas Jogo Tuk tidak dapat digunakan untuk perencanaan pengelolaan dan perlindungan LH	DLH	2	3	10
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**													
	7.1.Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi												

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	7.1.1.Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Pelaksanaan	Jumlah peserta pelatian sosialisasi dan jumlah desa yang teregistrasi kurang dari target	ROO 24.11.02.17	Bidang PSPK	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pada jam kerja dan bersamaan dengan kegiatan lain	Internal	C	Jumlah Desa Proklim yang terbentuk kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
	7.1.2.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Jumlah peserta pelatian sosialisasi dan jumlah sekolah yang teregistrasi kurang dari target	ROO 24.11.02.18	Bidang PSPK	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pada jam kerja dan bersamaan dengan kegiatan lain	Internal	C	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang terbentuk kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
8	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**													
	8.1.Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan												
	8.1.1.Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Pelaksanaan	Penilaian lomba berdasar subjektif juri	ROO 24.11.02.19	Bidang PSPK	Belum adanya standar acuan yang jelas terkait teknis operasional penilaian	Internal	C	Hasil penilain kurang kredibel	Masyarakat	2	3	11
9	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**													
	9.1.Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan												
	9.1.1.Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pelaksanaan	Aduan masyarakat terlambat ditangani	ROO 24.11.02.20	Bidang PDPL	Jumlah SDM terbatas	Eksternal	UC	Berlarutnya permasalahan lingkungan hidup dan tidak tertanganinya aduan masyarakat dengan optimal	Masyarakat	3	3	14

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	9.1.2.Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Pelaksanaan	Sanksi yang diberikan tidak di terapkan	ROO 24.11.02.21	Bidang PDPL	Kurangnya kesadaran pelaku usaha	Eksternal	UC	Berlarutnya permasalahan lingkungan hidup	Masyarakat	4	3	17
10	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**													
	10.1.Pengelolaan Sampah	Cakupan Desa Pengelola SampahPersentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3RPersentase jumlah sampah yang tertangani												
	10.1.1.Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Pelaksanaan	Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah terlambat ditetapkan dan/atau tidak berkualitas	ROO 24.11.02.22	Bidang PSPKLH	Data Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah belum terpenuhi, Beberapa Bank Sampah belum melaporkan secara rutin	Eksternal	UC	Muatan Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah tidak terakomodir di perencanaan anggaran dan kinerja daerah.	PEMDA	2	3	10
	10.1.2.Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pelaksanaan	Penyuluhan bank sampah dan tps3r tidak optimal	ROO 24.11.02.23	Bidang PSPKLH	Kurangnya SDM Penyuluh lingkungan hidup, Banyaknya Bank Sampah yang tidak aktif, jadwal yang tidak sinkron	Internal	C	Tidak berjalannya pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Masyarakat	2	3	10
	10.1.3.Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Sistem penanganan sampah belum baik	ROO 24.11.02.24	UPTD Pengelolaan Sampah	Kurang nya pengetahuan SDM pengelola sampah	Internal	C	Kurangnya sampah yang tertangani	Masyarakat	4	3	17

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	10.1.4.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Pelaksanaan	Terdapat sisa lebih pagu anggaran yang besar	ROO 24.11.02.25	Bidang PSPK	Ketidaksesuaian pagu antara indeks Kabupaten dengan KRISNA Kementerian LHK	Eksternal	UC	Inefisiensi anggaran	PEMDA	2	3	10
	10.1.5.Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	terjadi kerusakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	ROO 24.11.02.26	UPTD Pengelolaan Sampah	kondisi alat yang sudah tua	Internal	C	tidak maksimalnya penanganan sampah	DLH	2	3	10

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Urusan kehutanan saat renstra ini dibuat menjadi kewenangan Provinsi kecuali Taman hutan Raya (Tahura). Namun demikian, penyelenggaraan kegiatan pada wilayah terutama di sekitar hutan dapat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan, Perhutani maupun Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kinerja bidang urusan yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah terutama pada urusan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program.

Tujuan rencana strategis DLH 2025-2026 adalah terwujudnya lingkungan hidup yang baik dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH. Untuk mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu langkah tepat dan terpadu mulai perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada semua usaha dan/atau kegiatan, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi tegas. Sumber pencemar utama dan masif dari masyarakat yaitu sampah perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, renstra 2019 - 2024 memuat indikator sasaran perangkat daerah sekaligus sebagai indikator kinerja utama yaitu: Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim merupakan komposit indikator program antara lain: Persentase RTH Publik yang terkelola, Cakupan konservasi jogo tuk, Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup, dan Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup. Persentase RTH di wilayah perkotaan dihitung berdasar luas ruamg terbuka hijau baik privat maupun publik di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan saat renstra ini ditetapkan berdasar Peraturan kepala BPS No.10 Tahun 2010. Perhitungan dan target indikator persentase RTH di wilayah perkotaan sebaiknya direview ulang bila terdapat perubahan perda RTRW yang menetapkan secara jelas kawasan perkotaan. Indeks kinerja pengelolaan sampah dihitung berdasar perhitungan laporan capaian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin

PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dihitung dengan dasar jumlah usaha yang berkategori taat baik yang diawasi oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Kementerian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan perlu diawasi secara berkesinambungan. Target indikator kinerja utama tercantum pada tabel 7.1.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, setiap unit kerja pada Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait.

Indikator Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, perlu dibuat norma dan Standar Operasional Prosedur jelas. Indikator tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat didasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang terstruktur, independent, dan akuntabel. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan tidak hanya berdasar rencana upaya pengelolaan lingkungan pada Andal dan UKL-UPL namun juga berdasar update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua usaha/kegiatan serius melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, setiap usaha/kegiatan yang telah diawasi dan dibina namun masih belum menunjukkan iktikad baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberi sanksi.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, perlu adanya sinergi antara penanggung jawab indikator penanganan sampah dann indikator pengurangan sampah. Perlu dibuat standar operasional yang jelas agar penghasil sampah benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sehingga diupayakan seoptimal mungkin penghasil sampah memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan *reduce, reuse, dan recycle.*

Pencapaian target indikator Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh peran serta aktif masyarakat. Perlu sosialisasi dan publikasi masif tentang ancaman bencana longosr, lahan kritis dan dampak perubahan iklim. Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata harus dilaksanakan berkelanjutan.

Tabel 7. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2025	2026	
1	**IKLH**	**Berdasarkan hasil evaluasi mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Tentang Perhitungan IKLH.**	**65,81 angka (0-80)**	**65,82 angka (0-80)**	**65,82 angka (0-80)**
1.1	*Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*	*Sesuai arahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.*	*41,76 angka (0-100)*	*41,98 angka (0-100)*	*41,98 angka (0-100)*
1.2	*Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	*(Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi jogo tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup + Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup)/4*	*62,11 %*	*63,04 %*	*63,04 %*
1.3	*Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah*	$\frac{\text{usaha dan kegiatan yang taat izin lingkungan dan PPLH}}{\text{jumlah usaha dan kegiatan yang wajib diawasi}} x\ 100\%$	*36,23 %*	*39,13 %*	*39,13 %*

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		
			Target	Rp	Target	Rp	
0.0.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	10.226.441.326	100%	10.068.965.717	SEKRETARIAT
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%		100%		SEKRETARIAT
2	**Urusan : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**						
2.11	**Bidang : Lingkungan Hidup**						
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100%	88.742.000	100%	81.030.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	33,71%	369.270.000	33,71%	337.182.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH Publik yang terkelola	100%	1.846.799.000	100%	1.686.320.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	100%	213.519.000	100%	194.965.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	63,01%	37.370.000	63,01%	34.122.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2025		2026		
			Target	Rp	Target	Rp	
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Cakupan konservasi jogo tuk	15,15%	75.288.000	16,30%	68.746.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	33,29%	76.933.000	35,86%	70.248.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100%	42.381.000	100%	38.699.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	100%	17.003.000	100%	15.525.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	54,99%	10.109.998.000	56,49%	9.369.584.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				23.103.744.326		**21.965.386.717**	

Tabel 7. 3 Perkiraan kondisi yang digunakan dalam penentuan target kinerja Tahun 2025 - 2026

DATA	SATUAN	CAPAIAN DAN RENCANA/TARGET			
		2023	2024	2025	2026
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	Usaha/kegiatan	23	24	25	27
Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Usaha/kegiatan	69	69	69	69
Jumlah usaha/kegiatan taat pengendalian pencemaran air	usaha/kegiatan	20	20	20	20
Jumlah usaha/kegiatan wajib taat pengendalian pencemaran air	usaha/kegiatan	50	50	50	50
Jumlah usaha/kegiatan taat pengendalian pencemaran udara	usaha/kegiatan	11	11	11	12
Jumlah usaha/kegiatan wajib taat pengendalian pencemaran udara	usaha/kegiatan	34	34	34	34
Luas kawasan resapan air yang dikonservasi	Ha	560	570	580	590
Luas kawasan resapan air	Ha	17075,7	17075,7	17075,7	17075,7
Jumlah mata air yang dikonservasi	unit	50	55	60	65
Jumlah target mata air yang dikonservasi	unit	223	223	223	223
Jumlah Desa melaksanakan ProKlim	Desa/Kelurahan	80	90	100	110
Jumlah Desa dan Kelurahan	Desa/Kelurahan	372	372	372	372
Jumlah sekolah Adiwiyata	Sekolah	71	76	81	86
Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata	Sekolah	204	204	204	204
Luas RTH Publik dikelola	Ha	22,1	22,1	22,1	22,1

BAB VIII
PENUTUP

Dinas lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Perubahan rencana strategis ini diharapkan sebagai panduan dalam perencanaan kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2025 – 2026. Indikator – indikator yang ditetapkan diusahakan dapat terukur sehingga cenderung kuantitatif. Penanggungjawab masing-masing indikator harus cerdas untuk menerjemahkan ukuran kuantitatif hingga ke ranah kualitatif. Indikator kinerja yang telah ditetapkan diharapkan menggambarkan hasil kerja nyata yang tidak hanya dilihat sebagai angka semata.

Keberhasilan pencapaian target kinerja diharapkan sebagai benar – benar keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana ditentukan oleh kondisi ideal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen ini. Sumber daya manusia, peraturan, dan anggaran selama lima tahun ke depan diperkirakan relatif sebanding. Diperlukan banyak kerja cerdas dan inovasi untuk menyiasati kelemahan dan kekurangan. Tentu terdapat banyak kondisi yang tidak sesuai dengan perkiraan saat perencanaan, namun penanggungjawab masing – masing indikator diharapkan dapat bijak, semangat dan ikhlas dalam menyikapinya. Sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan melaksanakan falsafah "*lentur ning ojo miyur*". Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan diharapkan dapat fleksibel menyesuaikan kondisi namun tetap harus disiplin dan fokus pada tujuan perangkat daerah. Perlu dilaksanakan evaluasi berkala dan terus menerus untuk mencapai kondisi ideal.

Pada akhirnya, kiranya Alloh, SWT, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan terutama untuk Kabupaten Magelang dan Indonesia yang kita cintai ini.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG



SARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199312 1 001

POHON KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

Catatan :
1. Kode diiisi kode indikator kinerja yang telah disusun
2. Indikator diisi indikator kinerja sesuai dengan tingkatannya
3. Indikator kinerja diisi sesuai kewenangnnya yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, apabila satu jabatan memiliki indikator yang berbeda level maka dapat dibedakan berdasarkan kode indikator.
4. Apabila indikator kinerja pada level kegiatan diampu oleh lebih dari 1 (satu) eselon IV, maka indikator tersebut ditarik ke eselon III.
5. Penataan bagan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah.

Sumber Data : Perubahan Rencana Dinas Lingkungan Hidup 2019-2024

Penetapan: Peraturan Bupati Nomor :Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Visi	
Misi	
TUJUAN DAERAH :	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
Indikator Kinerja : 4	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan
Sasaran Daerah:	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Indikator Kinerja : 4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kepala Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran PD : Meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup

Indikator Kinerja : 4.1.1a — Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup

4.1.1a.1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah
4.1.1a.1.1	Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH
4.1.1a.1.1.01	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun
4.1.1a.1.1.02	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota
4.1.1a.1.2	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten
4.1.1.a1.2.01	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
4.1.1a.1.2.02	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
4.1.1a.5	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan
4.1.1a.5.1	Persentase pemenuhan dokumen lingkungan
4.1.1a.5.1.01	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
4.1.1a.5.2	Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup
4.1.1a.5.2.01	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1a.4	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM
4.1.1a.4.1	Persentase penanganan pengaduan lingkungan
4.1.1a.4.1.01	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani
4.1.1a.4.1.02b	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

Kepala Bidang Pengendalian Pencemarandan Kerusakan Lingkungan Hidup

4.1.1a.3	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan
4.1.1a.3.1	Persentase usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan
4.1.1a.3.1.01	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4.1.1a.3.1.02	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
4.1.1a.3.2	Jumlah limbah B3 medis yang ditangani
4.1.1a.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya
4.1.1a.2	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4.1.1a.2.1a	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau
4.1.1a.2.1a.01	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
4.1.1a.2.2a	Profil Gas Rumah Kaca yang tersusun
4.1.1a.2.2a.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
4.1.1a.2.5c	jumlah pemulihan pencemaran yang terlaksana
4.1.1a.2.5c.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya

Indikator Kinerja : 4.1.3a — Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup

4.1.3a.2	Cakupan konservasi jogo tuk
4.1.3a.2.1a	jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat
4.1.3a.2.1a.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
4.1.3a.2.2b	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk
4.1.3a.2.2b.01	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan
4.1.3a	Persentase RTH Publik yang terkelola
4.1.3a.1.1	Luas lahan keanekaragaman hayati yang dikelola
4.1.3a.1.1.01	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
4.1.3a.1.1.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

4.1.1a.2.3a	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi
4.1.1a.2.3a.01	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan

4.1.1a.2.4b	Jumlah informasi pencegahan pencemaran yang dibuat
4.1.1a.2.4b.01	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

4.1.3a.4	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
4.1.3a.4.1	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan
4.1.3a.4.1.01	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
4.1.3a.3	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup
4.1.3a.3.1	Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi
4.1.3a.3.1.01	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH
4.1.3a.3.1.02	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
4.1.2a.1	Persentase pengelolaan sampah
4.1.2a.1.1a	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
4.1.2a.1.1.01	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
4.1.2a.1.1.02	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah

4.1.2a.1.2a	Persentase jumlah sampah yang tertangani
4.1.2a.1.2a.01	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
4.1.2a.1.2a.02	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
4.1.2a.1.2a.03	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
4.1.2a.1.2a.04	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah

4.1.2a.1.2a.04	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir

Indikator Kinerja : 4.1.2a — Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Sekretaris Dinas

4.1.2a.2a	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah
4.1.2a.3a	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah

Kepala Subbagian Program

4.1.2a.2a.1.	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
4.1.2a.2a.1.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.1.2a.2a.1.02	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.1.2a.2a.1.03	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kepala Subbagian Keuangan

4.1.2a.2a.2.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan OPD
4.1.2a.2a.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4.1.2a.2a.2.02	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

4.1.2a.3a.1	Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian perangkat daerah
4.1.2a.3a.1.01	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4.1.2a.3a.2	Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah
4.1.2a.3a.2.01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.1.2a.3a.3	Persentase ketercapaian pengadaan barang kantor
4.1.2a.3a.3.01	Jumlah alat dan mesin yang dibeli
4.1.2a.3a.3.02	Jumlah mebel yang dibeli
4.1.2a.3a.4	Persentase ketercapaian pelayanan jasa penunjang perangkat daerah
4.1.2a.3a.4.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.1.2a.3a.4.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4.1.2a.3a.5	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang penunjang milik daerah
4.1.2a.3a.5.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
4.1.2a.3a.5.02	Jumlah Mebel yang Dipelihara
4.1.2a.3a.5.03	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
4.1.2a.3a.5.04	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
4.1.2a.3a.5.05	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Urusan	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah/Isu Strategis PD	Sasaran Daerah/Tujuan PD	Indikator Sasaran Daerah/Tujuan PD	Formula Indikator Sasaran Daerah/Tujuan PD	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Masalah Pokok PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Sasarab Program	Strategi PD	Indikasi Program	Indikator Program	Formula Indikatir Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan	Sasaran Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah)/2	Belum optimalnya kinerja layanan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(IKA*0,376)+(IKU*0,405)+(IKL*0,219)	Meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	{(Jumlah usaha kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air/Jumlah usaha kegiatan target pengendalian pencemaran air) x 100%) + (Jumlah usaha kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara/Jumlah usaha kegiatan target pengendalian pencemaran udara) x 100 %)}/2	Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar	**Terlaksananya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap sumber pencemar	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Usaha dan/atau kegiatan**	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau Profil Gas Rumah Kaca yang tersusun Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	Usaha/Kegiatan Dokumen Parameter		Dinas Lingkungan Hidup
										Meningkatkan pengelolaan dan penanganan limbah											Perlunya monitoring dan pelaporan GRK		monitoring rutin dan pelaporan GRK						
										Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim											Perlunya laboratorium lingkungan yang kompeten		Meningkatkan kompetensi laboratorium lingkungan						
										Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup											Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar		Meningkatkan pembinaan terhadap sumber pencemar udara	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		
										Meningkatkan pengelolaan persampahan											Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK						
																					Perlunya monitoring rutin kualitas air		Melakukan monitoring rutin kualitas air						
																					Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air		Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar air						
																					Belum optimalnya pengendalian pencemaran usaha kecil		Meningkatkan pengendalian pencemaran usaha kecil						
																					Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK		Meningkatkana pengawasan terhadap sumber GRK	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		
																					Belum optimalnya jumlah sampel yang diperiksa		Meningkatkan jumlah sampel yang diperiksa	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen		
																					Belum optomalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Optimalnya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Mengoptimalkan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Perangkat daerah, Usaha. Dan Kegiatan dalam koordinasi UPTD Laboratorium Lingkungan**	Jumlah informasi pencegahan pencemaran yang dibuat	LHU		
																					Belum optimalnya kapasitas pengelola laboratorium		Meningkatkan kapasitas pengelola laboratorium	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan		
																					Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium		Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium						
																					Belum optimalnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Optimalnya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Mengoptimalkan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Usaha dan/atau kegiatan**	jumlah pemulihan pencemaran yang terlaksana	Paket		
																					Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air		Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya	Dokumen		
																					Perlunya sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan		Melakukan sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan						
															Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Peningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	(Jumlah limbah B3 sektor industri yang dikelola/Jumlah limbah B3 sektor industri)*100%	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3	**Meningkatnya Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Usaha dan/atau kegiatan**	Persentase usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	%	(Jumlah usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan/Jumlah Usaha sektor industri yang menghasilkan limbah B3) x 100%	
																					Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3		Meningkatkan pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		
																					Belum optimalnya pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3		Meningkatnya pembinaan pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan		
																					Belum optimalnya pengumpulan limbah B3 Covid 19	**Terbuna dan terfasilitasinya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Membina dan memfasilitasi pengumpulan limbah B3 Covid 19	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Masyarakat penghasil limbah B3**	Jumlah limbah B3 medis yang ditangani	Ton		
																					Belum tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 medis		Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 medis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen		
																					Perlunya kerjasama dengan pengelola limbah B3		Melaksanakan kerjasama dengan pengelola limbah B3						
															Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan lingkungan hidup.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap ijin lingkungan	(Persentase pemenuhan dokumen lingkungan + Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup)/2	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Usaha dan/atau kegiatan**	Persentase pemenuhan dokumen lingkungan	Persen	(Jumlah dokumen lingkungan terdaftar/Jumlah pengajuan dokumen lingkungan) x 100%	
																					Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup		Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup			Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	Persen	(Jumlah laporan pengelolaan lingkungan yang masuk/Jumlah usaha dan kegiatan wajib lapor pengelolaan lingkungannya) x 100%	
																					Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup		Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen		
																					Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan belum berdokumen lingkungan		Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		
															Diperlukannya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan dan kajian lingkungan hidup yang baik	Menyusun perencanaan dan kajian lingkungan hidup yang baik	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	(Jumlah kajian, perencanaan dan pelaopran lingkungan hidup yang disusun/Jumlah kajian, perencanaan, dan pelaporan yang seharusnya ada) x 100%	Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah	**Optimalnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Mengoptimalkan pelaporan kinerja pengelolaan LH daerah	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Perangkat daerah dalam koordinasi bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup**	Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH	Persen	(Jumlah laporan pengelolaan lingkungan yang masuk/Jumlah usaha dan kegiatan wajib lapor pengelolaan lingkungannya) x 100%	
																								Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		
																								Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		
																					Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah	**Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Penggunaan KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Perangkat daerah dalam koordinasi bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup**	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten	Dokumen		
																								Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		
																								Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		

Urusan	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Nomilah Pelaku Daerah/Isu Strategis PD	Sasaran Daerah/Tujuan PD	Indikator Sasaran Daerah/Tujuan PD	Formula Indikator Sasaran Daerah/Tujuan PD	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Nomilah Pelaku PD	Gasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	Nomilah PD	Gasaran Program	Strategi PD	Indikasi Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Alur Nomilah PD	Arah Kebijakan	Gasaran Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Gasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
															Kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal	Tegaknya hukum dan terlaksananya penanganan kasus lingkungan hidup	Penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait (in lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	(Jumlah kasus lingkungan yang ditangani/Jumlah kasus lingkungan)+(Pengaduan masyarakat yang ditangani/Total jumlah pengaduan masyarakat yang tersgistrasi)*100%	Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani	Terselesaikanya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Meningkatkan penanganan aduan lingkungan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Usaha dan/atau kegiatan	Persentase penanganaan pengaduan lingkungan	Persen	(Jumlah aduan dan kasus lingkungan diselesaikan/Jumlah aduan dan kasus lingkungan tersttafasi) x 100%	
																					Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lin lingkungan		Meningkatkan kebaikan terhadap dokumen (in lingkungan para pelaku usaha dan/atau kegiatan	Pengelolaan Pengaduan Pemecahkan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen		
																							Penerapan tankis administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sangkata, dan/atau Penyelilan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen		
													Indeks kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Sesuai perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor K.333/menlhk/setjen/kum.1/4/2020 tentang rilis KLHK tahun 2020-2024	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan	Peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Neraca Jastrada Pengelolaan Sampah	Belum optimalnya kinerja penanganan sampah	Terfasilitanya Sampah		Optimalkasi kinerja penanganan sampah	Pengelolaan Sampah	Masyarakat, Usaha dan/atau kegiatan	Cakupan Desa Pengelola Sampah	(Jumlah desa dan kelurahan yang mengelola sampah/Jumlah desa dan kelurahan) x 100%	
																										Persentase jumlah sampah yang tertangani	Neraca Jastrada Pengelolaan Sampah	
																					Belum optimalnya kinerja pengurangan sampah sampah		Optimalkasi kinerja pengurangan sampah			Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Neraca Jastrada Pengelolaan Sampah	
																					Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang		Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah	Pemyusunan Renicana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen		
																					Perlunya pengembangan teknologi pengurangan sahpah		Mengembangkan teknologi pengurangan sampah	Pengurangan sampah melalui pemburan ulang sampah		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembtasaan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan		
																					Belum optimalnya pemanfaatan dan daur ulang sampah		Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengurangan sampah						
																					Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah		Optimalkasi kinerja pengurangan sampah						
																					lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah		Pemanfaatan teknologi dalam pengurangan sampah						
																					Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah		Pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPS1/SPA Kabupaten/Kota	Ton		
																					Belum optimalnya pengolahan sampah		Meningkatkan penanganan sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengompsoan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		
																							Meningkatkan Penanganan sampah melalui pemanfaatan	Penanganan sampah melalui pemanfaatan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemanfaatan	Ton		
																							Meningkatkan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		Persentase luas layanan pengumpulan	Persen		
																					Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah		Meningkatkan fasilitas pengolahan sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok		
																					Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah		Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPS? Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kelompok		
																					Belum optimalnya pemilahan sampah		Meningkatkan pemilahan sampah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit		
																					Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah	Terbitnanya dan terawasinya Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Mengoptimalkan pembatasan timbulan sampah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Paket		
																								Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan		
																					Perlunya pengelolaan keanekaragaman hayati	Terfasilitanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keanekaragamanhayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang terbuka hijau, Taman keanekaragaman hayati, dan Kebun Raya	Luas lahan keanekaragaman hayati yang dikelola	Ha		
																					Perlunya pengelolaan ruang terbuka hijau		Mengoptimalkan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		
																					Perlunya pemanfaatan lam RTH Publik dikelola		Pemanfaatan RTH publik yang dikelola						
																					Perlunya sarana prasarana tambahan untuk pengelolaan RTH		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit		
																					Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH		Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH						
																					Belum optimalnya kearifan local dan inisiasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terakuinya dan terlindungnya Masyarakat hukum adat dan kearifan lokal terkait PPLH	Pengakuan dan Pembinaan terhadap Masyarakat hukum adat dan kearifan lokal terkait PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan konservasi jaga tuk	(Persentase Mata Air yang dikonservasi + Persentase Daerah resapan air yang dikonservasi)/2	Belum optimalnya pelaksanaan konservasi daerah resapan air	Meningkatnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Meningkatkan konservasi sumber daya air melalui kegiatan vegetatif dan sipil teknis	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat	Dokumen		
																										Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen		
																					Perlunya peran serta masyarakat dalam konservasi mata air	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi mata air	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	Komunitas		
																								Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdimpingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen		
																					Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatkan pendidikan lingkungan hidup sejak dini	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasyarakatan, Desa Prukim dan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Prokim yang tersgitrasi	Sekolah/Desa		
																					Belum optimalnya penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim		Meningkatkan penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga		
																					Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana		Meningkatkan konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		
																					Belum optimalnya penghargaan terhadap masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Meningkatnya penghargaan terhadap masyarakat dan/atau individu pengelola lingkungan hidup	Pemberian penghargaan terhadap masyarakat dan/atau individu pengelola lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok/individu yang mendapat penghargaan di bidang LH	(Jumlah kelompok lingkungan yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup/Jumlah kelompok peduli lingkungan yang diajukan mendapat penghargaan) x 100%	Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH	Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Memfasilitasi kegiatan penghargaan lingkungan hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Individu, Usaha, Kegiatan dan Lembaga kemasyarakatan peduli lingkungan	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	Paket		
																					Perlunya fasilitasi dan koordinasi lomba bersih sehat		Memfasilitasi dan mengkoordinasikan lomba bersih sehat	Pemblaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dimlai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dimlai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024 dan dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 dibutuhkan dokumen rencana pembangunan sampai ditetapkannya Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah;
c. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Bupati menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026 serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENSTRA PD TAHUN 2025-2026

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2026.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun
berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

(1) Renstra PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Renstra Dinas Kesehatan;
   c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
f. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
i. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
k. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Renstra Dinas Perhubungan;
n. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
p. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
r. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
t. Renstra Sekretariat Daerah;
u. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
v. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
w. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
x. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
y. Renstra Inspektorat;
z. Renstra Kecamatan Salaman;
aa. Renstra Kecamatan Borobudur;
bb. Renstra Kecamatan Ngluwar;
cc. Renstra Kecamatan Salam;
dd. Renstra Kecamatan Srumbung;
ee. Renstra Kecamatan Dukun;
ff. Renstra Kecamatan Sawangan;
gg. Renstra Kecamatan Muntilan;
hh. Renstra Kecamatan Mungkid;
ii. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
jj. Renstra Kecamatan Tempuran;
kk. Renstra Kecamatan Kajoran;
ll. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
mm. Renstra Kecamatan Bandongan;
nn. Renstra Kecamatan Candimulyo;
oo. Renstra Kecamatan Pakis;
pp. Renstra Kecamatan Ngablak;
qq. Renstra Kecamatan Grabag;
rr. Renstra Kecamatan Tegalrejo;
ss. Renstra Kecamatan Secang;
tt. Renstra Kecamatan Windusari; dan
uu. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

I. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Urusan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Jabaran atas amanat pemajuan kebudayaan Sebagai landasan normatif urusan kebudayaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi Pemerintah dan Daerah dalam melaksanakan "pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan". Dengan demikian dipahami bahwa titik temu pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan berada pada pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Sehingga layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Selain pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global dan regional, termasuk Kabupaten Magelang, dinamika regulasi nasional yang ditetapkan paska penetapan RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan hidayah Nya sehingga penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen perencanaan yang sekaligus untuk memberikan arah pembangunan kepada pemangku kepentingan agar dapat berperan aktif dalam membangun wawasan kebangsaan, karakter Pancasila, membangun sistem kewaspadaan dini daerah, penanganan konflik sosial, serta Pembangunan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang lebih bermartabat demi mewujudkan kondusifitas daerah yang stabil.

Dokumen perencanaan ini masih memungkinkan diadakan perbaikan-perbaikan demi kesempurnaannya. Semoga dokumen perencanaan ini dapat bermanfaat untuk memberikan arah pembangunan selama 2 (dua) tahun ke depan, tolok ukur perencanaan rencana kerja tahunan, dan sarana evaluasi perencanaan strategis di masa yang akan datang.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGELANG

M. TAUFIK, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710323 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/389/KEP/11/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi;
b. menyusun dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 sesuai dengan tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/389/KEP/11/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud.
2.	ISMAIL, S.Si., M.Si.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
3.	BAMBANG JATMIKA, S.Si., M.Eng	Kepala Subbagian Program	Anggota	
4.	JONI BUDI HERMANTO, S.I.Pem., M.M.	Kepala Bidang Konservasi dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup	Anggota	
5.	LONO HARTANTO, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	USWATUN WULANDARI, S.Psi., M.Pd.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Penghargaan Lingkungan Hidup	Anggota	
7.	DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.	Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan	Anggota	
8.	IMANUEL ADHI KURNIA, S.T.	Kepala UPT Pengelolaan Sampah	Anggota	
9.	RATNANINGSIH, S.ST., M.T.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Anggota	
10.	SUMARDI	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
11.	ENDANG HERAWATI, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
12.	HENY MURDIYANINGRUM, S.T., M.M.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota	
13.	ARIF BUDI WIBOWO, S.Pi., Msi.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota	

1	2	3	4	5
14.	DONNY FAISAL ABRORY, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota	
15.	SOKO WIBOWO, S.E.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota	
16.	ROFIK ISDWIYANI, S.Si., M.Ec. Dev.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota	
17.	INUN SETIYANI, S.T., M.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	Anggota	
18.	ROBI HARI MARHESA, S.T., M.Ling.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	Anggota	
19.	FAJAR DWI LAKSONO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota	
20.	SAMBODO, A.Md.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	Anggota	
21.	RUDI SUPRANANSIS	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003